

ANALISIS FAKTOR TERJADINYA KRISIS POLITIK DI BELARUS PADA

TAHUN 2020

SKRIPSI



Oleh:

ARI SEPTYAN PUTRI

18323140

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**ANALISIS FAKTOR TERJADINYA KRISIS POLITIK DI BELARUS PADA
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ARI SEPTYAN PUTRI

18323140

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR TERJADINYA KRISIS POLITIK DI BELARUS
PADA TAHUN 2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

8 Agustus 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.

2 Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D

3 Willi Ashadi, S.H.I., M.A.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Selasa, 2 Agustus 2022



Ari Septyan Putri

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan untuk:

Bapak Amirullah dan Ibu Sri Dinaningsih

Terima kasih atas semua doa, dukungan, pengertian, kesabaran, dan nasihat yang diberikan Papa dan Mama.

Adik-adikku, Amelia Desyani Putri dan M. Arfin Fabyan Putra

Terima kasih atas semangat dan doa yang diberikan kepada penulis.

Rekan-rekan HI UII Angkatan 2018

Terima kasih atas ucapan semangat serta doa dan kebersamaan selama perkuliahan di Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia.

HALAMAN MOTTO

“Cheese and wine taste horrible on their earliest stage. Sometimes you are not milk or fresh fruits. Sometimes you are cheese and wine.”

“This too, shall pass.”

“Even the world you called the floor could be a good world, so it’s okay.”

-Kim Doyoung

“The act of wanting to pursue something maybe even more precious than actually becoming that thing. Being in the process itself is a prize. Remember that slumps are part of the process too. No need to run. Just walk and see everything around us.”

-Mark Lee

الجامعة الإسلامية
الاستدلال والتدو

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha penyayang atas segala nikmat, karunia, dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik. Penulis menyadari bahwa lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang senantiasa diberikan oleh berbagai pihak, sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan hasil yang baik. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa syukur dan terima kasih atas berbagai bentuk dukungan dan bantuan baik berupa moril dan materil. Tak terhitung pengalaman serta ilmu yang penulis dapatkan selama proses penulisan skripsi ini. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog.
4. Ketua Program Studi Hubungan Internasional, Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
5. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas waktu, bimbingan, serta arahan dan bantuan yang diberikan dalam proses penyelesaian tugas akhir saya ditengah kesibukan dan keseharian Bapak. Selama bimbingan berlangsung baik daring maupun luring, saya merasa sangat terbantu dengan arahan Bapak yang jelas dan diskusi yang selalu seru sehingga saya bisa mendapatkan banyak ilmu baru. Terima kasih atas kepercayaan Bapak kepada saya sehingga saya merasa percaya diri dan dapat

menulis tugas akhir dengan baik. Semoga Pak Hadza sehat selalu dan kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT.

6. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak atas bantuan dan dampingan yang diberikan selama masa studi saya di HI UII. Terima kasih atas kata-kata motivasi yang Ibu berikan yang selalu menguatkan kami. Terima kasih juga atas bimbingan dan ajaran Ibu selama taklim 4 semester. Terima kasih atas semua kebaikan hati Ibu kepada saya. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah SWT dan semoga Ibu selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Aamiin.
7. Seluruh Dosen dan civitas akademika Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Berkat ilmu pengetahuan, ajaran, kebaikan, ketulusan yang Bapak dan Ibu berikan, sehingga saya bisa belajar banyak hal serta mendapatkan berbagai kesempatan untuk bisa berkembang. Serta terima kasih untuk Mbak Diah yang selalu membantu dalam urusan administrasi dan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga prodi HI UII akan semakin sukses kedepannya dan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik dan melahirkan alumni-alumni yang sukses.
8. Untuk Mama dan Papa, terima kasih banyak atas semua kasih sayang, doa, dukungan, dorongan dan motivasi yang diberikan. Terima kasih karena selalu berusaha memberikan yang terbaik dan mendukung semua mimpi saya. Terima kasih karena selalu membebaskan untuk memilih sendiri keputusan apapun. Terima kasih karena selalu memberikan kepercayaan penuh dan selalu bangga terhadap semua pencapaian saya. Terima kasih karena bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi teman diskusi. Tanpa doa Mama dan Papa, saya tidak akan bisa

menyelesaikan tugas akhir dengan mudah. Terima kasih, semoga Mama dan Papa sehat selalu.

9. Kepada adik-adik saya, Amelia Desyani Putri dan M. Arfin Fabyan Putra, terima kasih karena doa dan ucapan semangatnya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir.
10. Kepada sahabat-sahabat saya, Husnul Khatimah, Siti Herni Wulandari, Nurul Istiqomah, Dalilah Femilia, dan Zahratul Hayati, terima kasih atas semua dukungan, doa, dan hiburan serta kebersamaan selama ini. Terima kasih karena selalu ada dalam semua fase kehidupan saya sejak sekolah dasar. Terima kasih karena selalu ada ketika penulis membutuhkan.
11. Kepada sobat *deadliner* saya Alifya Kasih Widjayanti, terima kasih karena menjadi teman belajar yang selalu saling mendorong untuk maju. Terima kasih sudah menemani sejak semester 1. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan. *Here's to many more dreams come true.*
12. Kepada *partner in crime*, sobat AIESEC, Gravenia Rahma Safira, terima kasih karena selalu menjadi teman yang memiliki satu visi dan *partner* dalam hampir semua hal. Terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik, terutama karena kita memiliki banyak kesukaan yang sama. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
13. Kepada teman-teman Jauh-Dekat lainnya, Melania Utami, Dzaky Hilmy Majid, Haidar Zacky, Yasril Faza, terima kasih karena sudah menjadi teman yang baik sejak semester 1. Terima kasih atas kenangan selama masa kuliah serta dukungan dari kalian semua.
14. Kepada teman-teman belajar yang baik, Akmal Maulana, Nadiyah Kholilah Yahya, Alifya Kasih Widjayanti, Muhammad Mulidan, Gufron Gozali, dan Dimas

Surya Saputra, terima kasih atas semua waktu yang digunakan untuk belajar dan berkembang bersama. Terima kasih karena sudah menjadi teman diskusi dan debat yang seru. Terima kasih karena memberikan banyak perspektif baru dalam melihat suatu isu dan selalu meramaikan kelas. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan menjadi motivasi untuk mendapat nilai yang bagus. Saya banyak belajar dari kalian. Kita hebat karena kita PBBA.

15. Kepada teman-teman saya di HI UII, Belva Eka Aulia, Zuliya Kumalafuri, Sauma Ghaita, Aminatul Marwiyah, Vivi Safitri Anau, Berliana Pundilaras, Fita Nur Aisyah, Yeta Purnama, terima kasih banyak karena sudah menjadi teman yang baik. Terima kasih atas bantuan dan pengertiannya selama masa perkuliahan.
16. Kepada teman-teman HI UII Angkatan 2018 dan Kakak tingkat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih karena sudah menjadi teman saya selama berkuliah di HI UII.
17. Kepada semua teman dan pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.5 Cakupan penelitian	7
1.6 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Kerangka Konseptual	13
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i>	17
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	17
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	17
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i>	18
BAB II	19
OTORITARIANISME DI BELARUS	19
2.1. Sejarah Otoritarianisme Presiden Alexander Lukashenko	19
2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Bertahannya Otoritarianisme Lukashenko	24
2.2.1 Legitimasi.....	25
2.2.2 Represi.....	30
2.2.3 Kooptasi.....	34
BAB III	39
ANALISIS FAKTOR TERJADINYA KRISIS POLITIK DI BELARUS PADA TAHUN 2020	39
3.1 Subjek	41

3.2 Objek.....	43
3.3 Tindakan (<i>Manifest dan Latent</i>)	43
3.4 Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikologis.....	46
3.5 Motivasi (<i>Intended</i> atau <i>Unintended</i>)	50
3.6 Pendekatan Positif dan Pendekatan Negatif	54
BAB IV	59
PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Alexander Lukashenko.....	23
--	----



DAFTAR SINGKATAN

BNF	: <i>Belarus National Front</i>
BNR	: <i>Belarusian National Republic</i>
BPSM	: <i>Belarusian Patriotic Union of Youth</i>
BTRC	: <i>Belarusian Television and Radio Company/Belteleradiocompany</i>
CEC	: <i>Central Election Commission</i>
IISEPS	: <i>Independent Institute of Socio-Economic and Political Studies</i>
KGB RB	: <i>Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti Respubliki Belarus</i>
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NATO	: <i>The North Atlantic Treaty Organization</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
SSRB	: <i>Soviet Socialist Republic of Belarus</i>

ABSTRAK

Belarus telah dicirikan sebagai negara dengan sistem otoritarianisme yang kuat dan dikenal sebagai negara diktator terakhir di Eropa. Presiden Alexander Lukashenko kembali memenangkan pemilu untuk yang keenam kalinya yang membuat ratusan ribu masyarakat Belarus melakukan aksi protes terbesar dalam sejarah pemerintahan Lukashenko. Adanya kebijakan represif serta kekerasan yang tertanam dalam sistem dan berbagai kecurangan pemilu membuat masyarakat Belarus menuntut perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan terjadinya krisis politik di Belarus pada tahun 2020 dan faktor apa yang membuat otoritarianisme Lukashenko bertahan hingga saat ini. Dalam melihat krisis politik ini, penulis menggunakan teori kekerasan struktural oleh Johan Galtung. Melalui teori ini, penulis mengidentifikasi penyebab terjadinya krisis politik adalah karena adanya kekerasan struktural yang menyebabkan rasa tidak aman dan ketidakadilan yang tertanam dalam struktur publik. Dalam menganalisis hal tersebut, ada enam dimensi yang digunakan yaitu subjek, objek, tindakan baik yang terlihat atau *manifest* serta yang tersembunyi atau *latent*, kekerasan fisik dan psikologis, motivasi atau dorongan (*intended* dan *unintended*), serta pendekatan positif dan pendekatan negatif. Hasil dari penelitian ini adalah keenam dimensi yang disebutkan oleh Galtung muncul yang menunjukkan Presiden Alexander Lukashenko terbukti melakukan kekerasan struktural terhadap masyarakat Belarus.

Kata kunci: *Belarus, aksi protes, kekerasan struktural, krisis politik, represi, Alexander Lukashenko.*

ABSTRACT

Belarus has been characterized as a country with a strong authoritarian system and is known as the last dictator state in Europe. President Alexander Lukashenko won the election for the sixth time, which triggered hundreds of thousands of Belarusians staged the biggest protest in the history of the Lukashenko government. The existence of repressive policies and violence embedded in the system and various electoral frauds have made Belarusians demand change. This study aims to find out the reasons for the political crisis in Belarus in 2020 and what factors have made Lukashenko's authoritarianism persist to this day. In looking at this political crisis, the author uses the structural violence theory by Johan Galtung. Through this theory, the author identifies that the cause of the political crisis is due to structural violence that causes insecurity and injustice embedded in the public structure. In analyzing this, there are six dimensions used, namely subject, object, actions be it visible (manifest) as well as hidden (latent), physical and psychological violence, motivation or encouragement (intended and unintended), as well as positive and negative approaches. The result of this research is that the six dimensions mentioned by Galtung appear which show that President Alexander Lukashenko is proven to have committed structural violence against the people of Belarus.

Keywords: *Belarus, protests, structural violence, political crisis, repression, Alexander Lukashenko.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belarus merupakan sebuah negara yang terletak di Eropa Timur dengan jumlah penduduk sebanyak 9,5 juta jiwa. Dalam Indeks Demokrasi tahun 2018 oleh The Economist, Belarus menduduki peringkat 137 dalam ranking dunia (Unit 2019, 17). Presiden Belarus Alexander Lukashenko memimpin Belarus sejak tahun 1994 dan telah memerintah selama 26 tahun secara otoriter. Sebelum menjadi Presiden, Alexander Lukashenko sudah menjadi deputi dalam parlemen Belarus yang pada saat itu Belarus masih merupakan negara satelit Soviet (SSR Belarus). Pada tahun 1996, Alexander Lukashenko meyakinkan masyarakat Belarus untuk menyetujui konstitusi baru yang memberinya kekuasaan tambahan termasuk hak untuk memperpanjang masa jabatannya, hak untuk memerintah dengan dekrit presiden, dan untuk memilih sepertiga dari majelis tinggi parlemen. Alexander Lukashenko menolak reformasi politik dan ekonomi, menekan kebebasan pers dan berpendapat secara individu, dan juga membuat Belarus terisolasi dari komunitas internasional (Britannica 2020).

Belarus memiliki salah satu catatan pelanggaran hak asasi manusia terburuk di Eropa. Pemerintahan otoriter Alexander Lukashenko tidak memberikan banyak pilihan bagi masyarakat Belarus. Pada pemilu tahun 2006, kurangnya kebebasan dan kejujuran dalam penyelenggaraan pemilu, persaingan politik yang tidak adil dan pembatasan media, serta kurangnya

transparansi terus menerus pada proses pemilu membuat rakyat merasa tidak puas dengan proses demokrasi yang terjadi (Marples 2006, 96-97). Malam sebelum pemilu diwarnai dengan penahanan sebagian besar calon presiden dan ratusan warga yang diantaranya adalah wartawan, aktivis hak asasi manusia, dan perwakilan masyarakat sipil lainnya. Otoritas Belarus menjelaskan bahwa sejumlah masyarakat yang ditangkap telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan mendapatkan denda administratif dengan alasan menyebabkan gangguan massal. Sementara itu, walau sebagian besar tahanan telah dibebaskan, namun puluhan dari mereka termasuk tiga mantan calon presiden masih ditahan (Blidaru 2020).

Pemilu tahun berikutnya di Belarus juga dimenangkan oleh Presiden Alexander Lukashenko yang sudah terjamin kemenangannya sebelum pemilu terjadi. Protes terbatas yang dilakukan oleh masyarakat yang terjadi setelah pemilihan presiden pada tahun 2006 juga 2010 selalu disambut dengan penindasan secara represif oleh otoritas yang berkuasa (Hall 2020).

Pemilihan Presiden pada tahun 2020 mencerminkan secara luas perkembangan dari pemilu tahun 2010 dimana kandidat oposisi diberi tekanan, diintimidasi, ditangkap, disiksa, protes massal setelah pemilu dibungkam, komunitas internasional banyak yang berpihak dengan kelompok oposisi, serta pemilihan yang tidak diakui oleh aktor internasional. Mendekati pemilihan umum pada 9 Agustus 2020, pihak otoritas menolak pendaftaran dari kandidat alternatif, dan ketika cara ini dirasa tidak cukup berhasil, beberapa kandidat itu dipenjara. Pihak

berwenang menerbitkan hasil pemilu yang menerangkan bahwa Alexander Lukashenko menang telak dengan 80,1% suara. Rezim yang berkuasa menggunakan taktiknya yang biasa dengan kekuatan dan hasil suara yang besar untuk Presiden Alexander Lukashenko (Blidaru 2020).

Namun, pihak berwenang salah perhitungan dan tidak mau mengakui bahwa masyarakat Belarus telah mengalami perubahan sosial dan tidak lagi mau menerima kecurangan pemilu massal. Jika Alexander Lukashenko “menang” dengan hasil 60% maka protes yang mengguncang Belarus sejak awal Agustus tidak akan terjadi di seluruh negara bagian. Opsi kemenangan dengan hasil akhir yang lebih dikurangi tidak dipertimbangkan oleh Lukashenko. Alexander Lukashenko sendiri bersikukuh bahwa kemenangan elektoral harus tegas, sehingga perolehan suaranya mencapai 80,1% (Hall 2020). Alexander Lukashenko yang melabeli dirinya sebagai “bapak bangsa” tidak dapat menerima bahwa sebagian besar pemilih tidak memilihnya dan ini membuktikan bahwa rezim ini telah kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan masyarakat Belarus yang sudah tidak ingin kebebasan mereka dirampas secara terus menerus.

Krisis politik di tahun 2020 juga dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang terjadi dalam rezim Lukashenko. Ibukota Belarus, Minsk, juga menunjukkan ketimpangan yang sangat jelas. Pinggiran ibukota Minsk ditinggali oleh masyarakat dengan apartemen blok yang sederhana, sedangkan mobil-mobil dan rumah mewah menonjol di pusat kota. Pejabat pemerintah Belarus tidak menyembunyikan kekayaan mereka. Bahkan

ketika krisis keuangan pada tahun 2011 terjadi, Gubernur Wilayah Brest Kanstantsin Sumar membeli mobil senilai lebih dari \$100.000.

Hal ini pada masa itu sempat menjadi kekhawatiran publik karena berdasarkan propaganda yang dilakukan pemerintah mengatakan bahwa gaji pejabat rata-rata, tetapi tidak mungkin jika gaji rata-rata bisa membeli barang-barang mewah, sedangkan masyarakat Belarus kesusahan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Digest 2013). Ketidakterbukaan pemerintah atas hal ini, yang mengarah ke korupsi besar-besaran yang tidak terdeteksi membuat masyarakat Belarus tidak memiliki banyak pilihan. Monopoli yang dilakukan oleh Alexander Lukashenko tidak hanya meliputi sektor politik, media juga dikendalikan oleh pemerintah untuk melindungi pihak yang berwenang serta pengusaha pro-pemerintah. Para ahli memperkirakan bahwa negara menguasai 70% dari ekonomi dan hirarki pemerintahan sepenuhnya bergantung pada Lukashenko dan kerabat atau rekan terdekatnya (Kirakosyan, et al. 2013, 4-5).

Krisis politik yang terjadi di Belarus tidak dapat dihindari setelah Presiden Alexander Lukashenko mengklaim masa jabatan keenam sebagai Presiden. Banyak masyarakat yang akhirnya melakukan aksi protes secara damai di pusat ibukota karena hasil dari pemilihan umum yang dianggap tidak sah. Presiden Lukashenko merespon aksi ini dengan menggunakan kekerasan. Bentrokan dengan polisi telah menewaskan dua orang dengan ratusan lainnya terluka serta sekitar 6.700 orang ditangkap. Aksi protes telah terjadi di seluruh Belarus sejak Juni 2020 karena kemarahan masyarakat atas pemenjaraan tokoh-tokoh oposisi, stagnasi ekonomi, dan

kelalaian Lukashenko dalam mengatasi COVID-19 yang ia sebut sebagai “psikosis”, yang dapat disembuhkan dengan vodka atau kunjungan ke sauna, meskipun Presiden sendiri baru-baru ini mengidap penyakit itu. Sejak Lukashenko mengumumkan kemenangannya, perkiraan tidak resmi untuk massa yang menghadiri protes di Ibukota Minsk antara 100.000 hingga 220.000 orang. Buruh turun ke jalan dengan berbagai tuntutan termasuk menghentikan kekerasan yang dilakukan polisi dan menggelar pemilu baru yang jujur dan adil. Ribuan orang termasuk pekerja pabrik, dan presenter TV telah melakukan aksi pemogokan untuk bergabung dalam protes dan menyerukan agar Presiden Lukashenko untuk mundur. Ditengah terjadinya resesi ekonomi dan pandemi COVID-19, Lukashenko perlu meminjam banyak uang dari pemerintah asing dan dengan hilangnya legitimasi, maka akan mengancam kemampuannya dalam mendapatkan pinjaman dari institusi Barat (Roache 2020).

Krisis politik di Belarus terjadi karena adanya pelanggaran hak-hak politik yang tidak diberikan oleh pemerintah yang berkuasa. Pertikaian politik yang diikuti dengan kekerasan membuat masyarakat Belarus melakukan aksi *civil disobedience* sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aturan-aturan represif yang diberlakukan oleh Presiden Alexander Lukashenko merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dibangun dalam struktur publik. Institusi pemerintah Belarus menjalankan kebijakan otoriter yang membuat masyarakat Belarus tidak merasa diuntungkan karena hak-hak serta tuntutan mereka

tidak terpenuhi sehingga masyarakat melakukan aksi protes massal untuk menuntut perubahan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi krisis politik di Belarus pada tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh Presiden Alexander Lukashenko dalam mempertahankan kekuasaannya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya krisis politik di Belarus pada tahun 2020.

1.4 Signifikansi Penelitian

Belarus merupakan negara di Eropa yang dipimpin oleh seorang diktator. Presiden Alexander Lukashenko telah membuat Belarus terisolasi dan tidak banyak melakukan kerjasama luar negeri dengan negara-negara lain. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Belarus merupakan negara yang banyak memiliki pelanggaran hak asasi manusia dengan membatasi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat terutama hak politik. Protes yang dilakukan oleh masyarakat sudah berkali-kali terjadi tetapi

selalu dibalas oleh otoritas Belarus dengan kekerasan atau penculikan aktivis. Puncak dari aksi protes masyarakat ini terjadi pada tahun 2020 sehingga penelitian ini penting dan layak diteliti karena isu ini masih baru. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menganalisis alasan krisis politik di Belarus terjadi dan akan mengaitkannya dengan penelitian yang sudah ada agar hasil penelitian ini jelas dan terukur.

1.5 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan memaparkan latar belakang terjadinya krisis politik di Belarus pada tahun 2020 dan konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Alexander Lukashenko untuk tetap berkuasa. Tahun yang digunakan adalah tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat Belarus merupakan yang terbesar dalam sejarah pemerintahan Alexander Lukashenko. Berbagai regulasi dan kebijakan yang hanya melanggengkan kekuasaannya ditambah dengan hasil pemilu Agustus 2020 yang menegaskan kemenangan Alexander Lukashenko membuat masyarakat Belarus melakukan aksi protes dengan skala besar sehingga menimbulkan krisis politik.

1.6 Tinjauan Pustaka

Aksi protes besar-besaran di Belarus telah membawa Belarus dalam perhatian dunia. Pemilihan Presiden yang kembali dimenangkan Alexander Lukashenko menimbulkan ketidakpuasan yang mengakar, yang sebelumnya telah tumbuh tidak terdeteksi selama 26 tahun masa jabatan Alexander Lukashenko. Belum pernah terjadi sebelumnya dimana 200.000

warga Belarus turun ke jalan di ibukota Minsk dan kota-kota lain untuk memprotes aksi represi yang dilakukan pemerintah yang berkuasa dan menuntut pengunduran diri dari Presiden Alexander Lukashenko. Berbeda dengan tetangganya Ukraina, Belarus hanya mengalami sedikit kerusuhan sosial sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1991, dan sudah ada beberapa penelitian yang membahas terkait hal ini.

Menurut jurnal *The Kremlin and The Protests in Belarus: What's Russia's Next Move?* karya Maxim Samorukov menjelaskan bahwa selama beberapa dekade yang lalu, mayoritas masyarakat Belarus tampaknya tetap menerima Lukashenko sebagai presiden. Kedekatan antara Belarus dengan Russia membantunya mempertahankan kekuasaannya dan membuat kas negara terbantu oleh subsidi dari Rusia. Bantuan Rusia menghasilkan impor energi yang murah dan pasar ekspor yang terjamin sehingga perekonomian Belarus sebagian besar terhindar dari reformasi pasar seperti yang dialami negara bekas Uni Soviet lain. Banyak yang menghargai stabilitas sosial dan ekonomi yang ditawarkan Alexander Lukashenko sehingga mentolerir penindasannya terhadap lawan politik, pengurangan kebebasan pers, dan aturan represif lainnya. Namun tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dari yang dulu. Dengan adanya kemerosotan minyak global, Russia menjadi enggan untuk mensubsidi Belarus melalui impor energi murah membuat perekonomian Belarus sulit untuk bertahan (Samorukov 2020).

Presiden Alexander Lukashenko menolak untuk menyesuaikan dengan kenyataan yang berubah dan bahkan tidak menyetujui reformasi

moderat yang diusulkan oleh pemerintahnya sendiri. Dalam jurnal tulisan Samurakov ini juga dijelaskan bahwa beberapa tahun sebelum krisis 2020 terjadi, Presiden Alexander Lukashenko berupaya untuk mendiversifikasi hubungan internasional Belarus dengan menjaga jarak dari Rusia dan memperbaiki hubungannya dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa yang kemudian Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut sebagian besar sanksi yang diberlakukan terhadap rezim Belarus. Namun ketika krisis 2020 terjadi, Lukashenko berbalik dengan meminta dukungan Russia. Meskipun awalnya Rusia bungkam, tetapi kemudian Russia melihat ini sebagai salah satu jalan untuk mengikat Belarus sedekat mungkin untuk menghalangi integrasinya dengan NATO dan Uni Eropa (Samorukov 2020). Jurnal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan karena menjelaskan mengenai kontrak sosial yang dibuat oleh Alexander Lukashenko demi mempertahankan pemerintahannya. Dalam jurnal ini juga dijelaskan mengenai strategi *soft belarusianisation* yang dilakukan oleh Lukashenko dalam menjalankan kebijakan luar negerinya demi mempertahankan legitimasi. Namun, jurnal tulisan Samurakov hanya membahas mengenai peristiwa krisis politik di Belarus pada tahun 2020 dan peran Rusia serta prospek hubungan kedua negara kedepannya. Sehingga, penelitian ini akan melakukan analisis yang berbeda dengan melihat kebelakang untuk mengetahui alasan terjadinya peristiwa krisis politik di Belarus pada tahun 2020.

Selanjutnya jurnal yang berjudul *Political Crisis in Belarus: Reasons and Perspectives* menjelaskan pandangan Dzianis Melyantsou bahwa setelah Lukashenko memenangkan pemilu dengan hasil 80,1%, aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi dalam sejarah sejak Belarus merdeka ini tidak dapat dihindari. Banyaknya bukti dari pelanggaran berskala besar terhadap pelaksanaan pemilu, terutama hasil dari pemungutan suara yang menegaskan kemenangan Presiden Alexander Lukashenko menjadi pemicu utama dari aksi protes yang terjadi di Belarus pada tahun 2020. Melyantsou menjelaskan mengenai perkembangan aksi protes dan tantangan yang akan dihadapi otoritas Lukashenko serta bagi masyarakat yang melakukan aksi protes (Melyantsou 2020).

Dzianis Melyantsou juga menjelaskan tanggapan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat terhadap krisis yang terjadi di Belarus. Uni Eropa dan Amerika tidak mengakui hasil resmi pemilu dan beberapa kali mengutuk perlakuan represi terhadap masyarakat oleh penegak hukum. Namun, Sviatlana Tsikhanouskaya yang merupakan kandidat oposisi pemilu 2020 juga tidak diangkat sebagai presiden terpilih. Tanggapan Uni Eropa dan Amerika menurut penulis lebih terkendali karena belum ada seruan untuk pemilu baru, dan bahkan Uni Eropa melanjutkan program kerjasama bilateral dengan pemerintah Belarus. Pada pertemuan tanggal 19 Agustus 2020, Dewan Eropa kemudian menyetujui perlunya menjatuhkan sanksi pribadi terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas kecurangan pemilu dan juga kekerasan yang terjadi terhadap pengunjung rasa (Melyantsou 2020). Jurnal ini relevan dengan penelitian karena

menjelaskan mengenai latar belakang terjadinya aksi protes pada tahun 2020 dan tantangan yang dihadapi Lukashenko dalam mempertahankan sistem politik Belarus. Jurnal ini juga membahas mengenai hambatan yang dirasakan oleh masyarakat yang melakukan aksi protes karena tanggapan Lukashenko yang membalas aksi protes damai dengan represi. Namun, jurnal ini tidak menjelaskan strategi yang digunakan oleh otoritas Belarus untuk mempertahankan kekuasaannya. Jurnal ini banyak menjelaskan tanggapan pihak luar seperti Rusia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, sehingga penelitian ini akan fokus untuk melihat dari faktor domestik dari pemerintah Belarus itu sendiri.

Presiden Alexander Lukashenko melakukan berbagai cara untuk membangun basis konsolidasi rezim otoriter yang kuat. Dalam jurnal lain yang ditulis oleh Sofie Bedford yaitu *The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society*, menjelaskan setelah pemilu presiden pada tahun 2020 yang mengumumkan kemenangan Lukashenko, masyarakat Belarus tidak bisa lagi menerima kecurangan pemilu dan melakukan aksi protes. Penulis menjelaskan yang membuat aksi protes pada tahun 2020 ini berbeda karena adanya erosi dalam tiga pilar yang mempertahankan stabilitas rezim otoriter yaitu represi, kooptasi, dan legitimasi (Bedford 2021).

Melalui *authoritarian consolidation theory*, Sofie Bedford menjelaskan dalam jurnal ini bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah Belarus sejak Alexander Lukashenko berkuasa membuat masyarakat Belarus yang semakin berkembang tidak

bisa menerimanya dan menuntut kemunduran Lukashenko. Selama ini masyarakat Belarus menerima *status quo* karena adanya kontrak sosial yang memberikan jaminan keamanan dan keuangan sebagai timbal balik dari kesetiaan. Presiden Alexander Lukashenko menolak untuk menerima bahwa keadaan masyarakat Belarus sebagian besar telah berubah yang membuat fondasi rezim otoriternya goyah. Penggunaan represi secara terus-menerus yang dilakukan oleh pemerintah Belarus juga semakin mengancam legitimasi sistem yang telah dibangun oleh Alexander Lukashenko (Bedford 2021). Jurnal ini relevan dengan penelitian karena membantu menjelaskan alasan yang digunakan oleh rezim Lukashenko untuk tetap berkuasa. Lukashenko memanfaatkan represi, legitimasi, serta kooptasi berkelanjutan sebagai strategi dalam membangun konsolidasi kekuatannya. Namun, jurnal ini tidak terlalu menjelaskan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh rezim Lukashenko. Sehingga penelitian ini akan melihat kekerasan apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan kepada masyarakat.

Berbagai gerakan sosial *non-violent* masyarakat selalu dibungkam oleh otoritas yang berkuasa dengan kekerasan. Berbagai lapisan masyarakat kemudian ikut serta dalam aksi protes terbesar dalam sejarah Belarus yang dipicu oleh berbagai alasan terutama kecurangan pemilu 2020, yang kemudian membawa Belarus dalam krisis politik. Aksi protes ini terus dibalas dengan kekerasan dan represi oleh pemerintah dan juga penangkapan aktivis-aktivis politik serta masyarakat yang ikut dalam aksi semakin banyak terjadi. Beberapa negara dan organisasi internasional juga

merespon dan menyayangkan sikap yang diambil oleh Presiden Alexander Lukashenko. Masyarakat terus turun kejalan untuk menuntut pemilu yang bebas dan adil yang diharapkan akan membawa perubahan bagi Belarus kedepannya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba melakukan analisis yang berbeda, di mana penulis akan mengkaji mengenai dinamika politik Belarus dengan melihat kondisi pemerintahan Belarus sendiri untuk mengetahui latar belakang terjadinya aksi protes terbesar dan krisis politik di Belarus dengan menggunakan teori kekerasan struktural oleh Johan Galtung.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teori yaitu, BAB 2 menggunakan *authoritarian consolidation theory* oleh Johannes Gerchewski untuk mengetahui strategi Lukashenko dalam mempertahankan kekuasaannya dan konsep *Structural Violence* yang ditulis oleh Johan Galtung yang merupakan salah satu pemikir yang memelopori studi tentang perdamaian dan kekerasan di BAB 3 dalam menjawab rumusan masalah.

Galtung melihat kekerasan sifatnya selalu merusak, dan kekerasan harus dihindari sebisa mungkin. Johan Galtung menjelaskan bahwa ada tiga jenis kekerasan yaitu *direct violence* (kekerasan langsung), *structural violence* (kekerasan struktural), dan *cultural violence* (kekerasan kultural). Melalui *triangle of violence*, Galtung membedakan mana kekerasan yang

dapat terlihat dan mana yang tidak terlihat. Kekerasan langsung dapat terlihat karena melibatkan penggunaan kekuatan fisik langsung, sedangkan kekerasan struktural dan kekerasan kultural tidak dapat terlihat karena bergantung pada struktur dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat (Galtung 1969).

Kekerasan struktural merupakan ketidakadilan sistemik yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kekerasan struktural lahir dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang dibangun dalam struktur publik. Kekerasan struktural dapat terlihat dari rasa tidak aman yang disebabkan oleh suatu institusi tertentu akibat kebijakan otoriter yang merugikan suatu kelompok tertentu. Galtung menjelaskan bahwa ada enam dimensi yang bisa digunakan untuk melihat kekerasan struktural yaitu subjek, objek, tindakan (*manifest* dan *latent*), kekerasan fisik dan kekerasan psikologis, motivasi atau dorongan (*intended* dan *unintended*), serta pendekatan positif dan pendekatan negatif (Galtung 1969).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep kekerasan struktural dalam menganalisis kasus yang dianggap lebih tepat karena konsep ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belarus yang otoriter dan represif dapat menyebabkan krisis politik. Pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko diwarnai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia terutama hak politik yang terus dirampas demi melanggengkan kekuasaan Lukashenko.

Kekerasan dibangun dalam struktur dan muncul dalam bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan seperti sumber daya yang tidak terdistribusi secara merata, tingkat pendidikan dan layanan medis tidak merata, serta tingginya kesenjangan yang ada di antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Galtung menggunakan analogi jika seorang kepala rumah tangga memukuli istrinya, jelas itu merupakan kasus kekerasan pribadi. Tetapi jika satu kepala negara membiarkan satu juta rakyatnya dalam ketidaktahuan dan membiarkan ketidakadilan yang terjadi, maka jelas ada kekerasan struktural. Oleh karena itu, Galtung menjelaskan kondisi kekerasan struktural sebagai sebuah ketidakadilan sosial (Galtung 1969).

Ketidakadilan sudah mengakar dalam struktur publik di Belarus. Belarus merupakan negara peringkat ketiga tertinggi mengenai ketidaksetaraan antar negara bagian. Belarus secara resmi memproklamasikan dirinya sebagai “negara untuk rakyat jelata”. Pada masa awal Presiden Lukashenko menjabat, Lukashenko memainkan peran sebagai pemimpin egaliter yang bekerja untuk kebaikan dari rakyat jelata (Digest 2013).

Penerapan aturan represif dan pemerintahan yang otoriter selama 26 tahun Lukashenko menjabat adalah bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan yang berada dalam struktur masyarakat. Institusi-institusi pemerintah Belarus menerapkan aturan represif sehingga membuat masyarakat Belarus merasa tidak aman dan dirugikan oleh pemerintahan yang otoriter. Kondisi domestik seperti ini ditambah dengan faktor lain

seperti kecurangan pemilu, hilangnya kebebasan pers, dan bahkan kegagalan Lukashenko dalam mengatasi COVID-19 membawa Belarus dalam sebuah kondisi baru.

Penelitian ini juga akan menggunakan *authoritarian consolidation theory* oleh Johannes Gerchewski untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh Presiden Alexander Lukashenko untuk tetap berkuasa selama 26 tahun lamanya. Ada tiga pilar yang digunakan dalam teori ini untuk melihat faktor yang menopang kestabilan rezim otokratis yaitu legitimasi (pembenaran, pengakuan), represi (ancaman, paksaan), dan kooptasi (pemberian keuntungan kepada kelompok tertentu agar tidak mempertanyakan sistem) (Gerschewski 2013, 14). Masyarakat Belarus melakukan aksi protes untuk menuntut pemerintah agar memberlakukan peraturan yang adil terutama dalam penyelenggaraan pemilu dan menuntut perubahan dalam struktur publik yang ada di Belarus. Oleh karena itu, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait krisis politik yang terjadi di Belarus dengan menggunakan 3 pilar yang dijelaskan oleh Gerchewski untuk mengetahui strategi yang digunakan rezim Lukashenko dalam BAB 2, khususnya dalam bagian 2.2. Serta konsep kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung seperti yang telah dijelaskan diatas untuk BAB 3 sekaligus untuk menjawab rumusan masalah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana metode ini merupakan salah satu jenis yang sangat dominan untuk digunakan dalam melakukan riset pada ilmu Hubungan Internasional. Dalam penggunaan metode kualitatif, penulis akan melakukan analisis secara deskriptif dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan guna memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini bersifat analisis dan deskriptif sehingga data ini dapat digunakan demi mencapai sebuah kesimpulan.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Belarus yaitu Presiden Alexander Lukashenko sebagai aktor utama, sedangkan objek penelitian ini adalah krisis politik yang terjadi di Belarus pada tahun 2020. Oleh karena itu penulis akan menganalisis bagaimana kondisi dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di Belarus sehingga menyebabkan terjadinya krisis politik di tahun 2020.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder didapatkan dari melakukan analisis sumber-sumber seperti buku, jurnal, dokumen, website resmi, serta berita *online* yang kredibel yang dapat membantu menguatkan analisis dalam penelitian.

1.8.4 Proses Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, proses penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara mengolah data. Penyajian data sendiri dapat berupa teks naratif ataupun grafik. Penulis melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, lalu kemudian memasukkannya dalam analisis penelitian.



BAB II

OTORITARIANISME DI BELARUS

2.1. Sejarah Otoritarianisme Presiden Alexander Lukashenko

Presiden Alexander Lukashenko telah memerintah Belarus sejak tahun 1994. Pada masa awal karirnya sebelum menjadi presiden, Lukashenko aktif dalam politik hingga akhirnya menjadi anggota parlemen *Belorussian Soviet Socialist Republic* (SSRB) di tahun 1990. Selama menjadi anggota parlemen SSRB, Lukashenko berusaha membangun citranya sebagai orang yang jujur, tulus, pembela hak-hak rakyat, dan pejuang korupsi. Lukashenko juga menolak memberikan suatu opini mengenai masalah apapun tanpa mempertimbangkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Dengan mengidentifikasi sudut pandang yang dimiliki masyarakat pada saat itu, Lukashenko memutuskan untuk menjauhkan diri dari reformasi pasar termasuk privatisasi, dan memberikan dukungannya kepada Perdana Menteri SSRB Vyacheslav Kebich, yang bertekad untuk memperlambat reformasi pasar, memulihkan hubungan ekonomi dan politik dengan Rusia, dan bahkan jika memungkinkan, menghidupkan kembali Uni Soviet (Ioffe 2014).

Tiga tahun sebelum pemilihan umum yang transparan dan demokratis pada tahun 1994, negara-negara tetangga Belarus mengalami gejolak politik, contohnya seperti Latvia dimana parlemen Latvia menghapus hak memilih bagi setengah juta rakyatnya. Di Lituania harga sewa rumah dan bahan makanan meroket sehingga pemerintah memotong dana yang digunakan untuk lansia, dan Rusia sedang mengalami gejolak politik dimana tank-tank menembaki parlemen demi kemajuan demokrasi. Masyarakat Belarus melihat kondisi negara-negara tetangga dan

memilih untuk menentang demokrasi dan kemajuan semacam itu. Pada saat kondisi kehidupan mayoritas masyarakat memburuk dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang mendorong ketidaksetaraan, Lukashenko memanfaatkan kesempatan itu. Keputusan Alexander Lukashenko untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pertama di Belarus diawali dengan mengambil alih *Supreme Soviet's Commission on Corruption*. Setelah tiga bulan bekerja, Alexander Lukashenko memberikan laporannya kepada *Supreme Soviet*. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa laporan komisi itu tidak menghasilkan konsekuensi yang signifikan, laporan itu membantu meningkatkan popularitas nasional Lukashenko dan kelompok-kelompok pendukung bermunculan di seluruh negeri (Ioffe, Lukashenko's Rise to Power and Belarusian Politics 2014, 127-129).

Pemilihan presiden pertama di Belarus dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1994. Prioritas masyarakat Belarus pada saat itu adalah memerangi korupsi dan mafia, mengurangi inflasi, dan memulihkan ketertiban. Di sinilah Alexander Lukashenko unggul. Pesannya kepada para pemilih bersifat definitif, sederhana, dan optimis dalam ketiga hal tersebut. Cara Lukashenko menjelaskan alasan dibalik krisis ekonomi membuat sebagian besar masyarakat Belarus tersentuh. Menurut penjelasannya, kekacauan dan ketidakadilan berakar pada pecahnya Uni Soviet dan reformasi pasar, sedangkan birokrasi yang berkuasa mengambil keuntungan dari kedua keadaan untuk memenuhi kantongnya sendiri (V. Silitski 2003). Lawan dari Lukashenko pada pemilu saat itu, Vyacheslav Kebich juga memperjuangkan ide yang sama, sehingga persaingan antara kandidat terkuat ini bukan tentang ide melainkan tentang kepribadian. Seorang pria yang dianggap

korup melawan seorang pria yang dianggap jujur. Alexander Lukashenko kemudian memenangkan pemilihan umum yang tercatat dalam sejarah sebagai pemilihan presiden pertama dan satu-satunya yang transparan dan demokratis dalam sejarah Belarus (Wilson, *Politics Either Side of Independence*, 1989–1994 2011).

Pada tahun 1995, Alexander Lukashenko mengadakan sebuah referendum untuk mencapai kepentingannya. Referendum nasional pertama pada tahun 1995 ini mencakup empat pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah memberikan bahasa Rusia status sebagai bahasa nasional kedua dari Belarus. Pertanyaan pertama kemungkinan besar didukung oleh hampir semua penduduk, karena hampir semua masyarakat Belarus juga berbicara menggunakan bahasa Rusia. Pertanyaan pertama juga dibuat untuk meningkatkan dukungan untuk pertanyaan kedua, yaitu mengganti bendera dan lambang nasional dengan versi modifikasi dari bendera Soviet Belarusia, bukan bendera merah putih dan Pahonia dari *The Grand Duchy* yang didukung oleh *Belarus National Front* (BNF). Pertanyaan ketiga berisi premis yang menekankan bahwa reintegrasi dengan Rusia akan menyelamatkan ekonomi Belarus. Pertanyaan keempat dirancang untuk merusak kredibilitas parlemen yaitu presiden memiliki hak untuk membubarkan *Supreme Soviet* (Parlemen). Referendum pada Mei 1995 dirancang untuk menghalangi anggota parlemen yang terpilih pada tahun 1990, karena pemilihan parlemen akan dilakukan dalam waktu dekat. Belarus pada saat itu telah menunda pemilihan parlemen selama mungkin, karena parlemen merupakan saingan institusional utama bagi Lukashenko (Wilson 2011, 174).

Referendum kedua diadakan pada tanggal 7 November 1996 yang dikhususkan untuk mengusulkan perubahan dalam konstitusi Belarus. Seperti pada tahun 1995, empat pertanyaan dimasukkan dalam referendum kedua. Pertanyaan pertama dan paling penting adalah pertanyaan yang ditujukan untuk persetujuan public atas versi baru dari konstitusi nasional, versi yang akan sangat memperluas kekuasaan presiden. Kekuasaan baru akan mencakup hak presiden (1) untuk mengangkat dan memberhentikan seluruh pemerintahan, dengan hanya Perdana Menteri yang menerima pengesahan dari parlemen; (2) mengangkat anggota Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Dewan Bank Nasional, serta Jaksa Agung (dengan persetujuan parlemen). Menurut versi baru konstitusi, parlemen akan diubah namanya dari *Supreme Soviet* menjadi Majelis Nasional dan akan mencakup dua kamar atau majelis yaitu, *House of Representatives* (yang lebih rendah) dan *The Council of the Republic* (yang lebih tinggi). Selain itu, presiden akan memiliki hak untuk membubarkan kedua majelis parlemen, misalnya, jika mereka tidak mendukung calon perdana menteri atau memberikan mosi tidak percaya pada pemerintah. Majelis rendah tidak akan memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang mengenai peningkatan pengeluaran anggaran negara atau penurunan pendapatan anggaran negara tanpa persetujuan presiden.

Pada saat yang sama, presiden dapat mengeluarkan dekrit yang akan menjadi undang-undang kecuali jika dibatalkan oleh setidaknya dua pertiga dari setiap kamar parlemen. Dengan kata lain, presiden akan memperoleh hak prerogatif legislatif yang hampir tidak terbatas. Presiden dapat diberhentikan dari tugasnya jika sakit parah atau melakukan kejahatan berat. Selain itu, masa jabatan presiden akan dimulai pada saat konstitusi baru mulai berlaku, dan itu berarti

bahwa masa jabatan kedua presiden, yang seharusnya berakhir pada 1999, akan diperpanjang hingga 2001 jika versi baru dari konstitusi diresmikan. Pertanyaan kedua dalam referendum adalah mengenai hari kemerdekaan yang ingin dipindahkan Lukashenko dari 27 Juli yang merupakan hari ketika Deklarasi Kedaulatan Nasional Belarus diadopsi pada tahun 1990, menjadi 3 Juli, yaitu hari ketika Minsk dibebaskan dari penjajah Jerman Nazi pada tahun 1944. Pertanyaan ketiga terkait dengan penjualan tanah tanpa batas, dan pertanyaan keempat tentang penghapusan hukuman mati (Ioffe 2014, 134). Lukashenko kemudian muncul sebagai pemenang dari pertarungannya dengan parlemen. Apa yang dicapai memang setara dengan kudeta, karena kekuasaan presiden sangat diperluas, sementara kekuasaan parlemen dibatasi. Referendum November 1996 ini adalah titik balik dalam memperkuat sistem pemerintahan otoriter di Belarus. Berbagai macam cara dilakukan oleh Lukashenko demi mempertahankan kekuasaannya sebagai Presiden Belarus. Tindakan yang dilakukan oleh Alexander Lukashenko adalah sebagai berikut:

Tanggal	Tindakan Yang Dilakukan
14 Mei 1995	Referendum nasional yang pertama, membatasi parlemen.
24 November 1996	Referendum kedua, memperluas kekuasaan Presiden.
17 Oktober 2004	Referendum ketiga, mengizinkan Lukashenko untuk mencalonkan diri sebagai Presiden untuk yang ketiga kali.
19 Maret 2006	Pemilu ketiga dimenangkan oleh Lukashenko, aksi protes dilakukan di <i>October Square</i> , massa dibubarkan oleh polisi.
19 Desember 2010	Lukashenko memenangkan pemilu, aksi protes dilakukan di <i>Independence Square</i> , 700 orang ditangkap.
2011	KGB melakukan penindasan pada oposisi dengan memberikan tekanan, intimidasi, dan penyiksaan.
11 Oktober 2015	Pemilu kembali dimenangkan oleh Lukashenko.

31 Maret 2020	Wawancara Lukashenko dengan <i>Times</i> mendorong masyarakat Belarus untuk minum <i>vodka</i> dan pergi ke sauna untuk menyembuhkan COVID-19. Lukashenko menolak membuat kebijakan untuk melindungi masyarakat.
Mei – Juni 2020	Penangkapan 3 calon kandidat Presiden dan 9 anggota yang melakukan kampanye di Hrodna.
Agustus 2020	Pemilu dimenangkan oleh Lukashenko. Aksi protes terbesar terjadi dengan sekitar 220.00 orang berpartisipasi. Ratusan orang terluka karena mendapat pukulan dan kekerasan, 6.700 orang ditangkap, 2 orang tewas.

Tabel 1. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Alexander Lukashenko

2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Bertahannya Otoritarianisme Lukashenko

Johannes Gerschewski dalam teorinya menjelaskan bahwa ada tiga pilar stabilitas yang menopang rezim otokratis yaitu legitimasi, represi, dan kooptasi. Tiga pilar stabilitas ini saling berhubungan dan selama mereka tetap seimbang, penguasa dapat mempertahankan cengkeraman mereka pada kekuasaan (Gerschewski 2013). Presiden Alexander Lukashenko telah berkuasa sejak pertama kali terpilih menjadi presiden Belarus pada tahun 1994. Belarus telah menjalani beberapa kali pemilu presiden yaitu pada tahun 1994, 2001, 2006, 2010, 2015, dan 2020. Alexander Lukashenko menjadi presiden dalam satu-satunya pemilihan yang relatif bebas dan adil pada tahun 1994. Pemilihan umum presiden selanjutnya juga dimenangkan oleh Alexander Lukashenko, tetapi tidak bebas dan tidak adil. *Freedom House* mengatakan bahwa pemilu di Belarus tidak memenuhi standar demokrasi karena tidak pernah ada transfer kekuasaan yang demokratis di Belarus. Liputan media tidak memberikan informasi yang baik untuk membuat pilihan mengenai para kandidat. Selama periode kampanye, kebebasan

berekspresi dan berkumpul dibatasi untuk mempersulit kebebasan memberikan pernyataan publik, serta adanya kerangka hukum yang membatasi. Calon independen dan oposisi mengalami kesulitan dan dalam proses penghitungan suara ditemukan banyak kejanggalan. Sementara itu, kandidat yang pro terhadap pemerintah memenangkan semua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kandidat independen tidak mendapatkan satupun kursi. Akibatnya pemilihan di Belarus gagal memenuhi standar demokrasi (Kolarzik and Terzyan, *The State of Human Rights and Political Freedoms in Belarus: Was the Crisis Inevitable?* 2020).

Presiden Alexander Lukashenko menggunakan berbagai macam cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Menurut teori, kestabilan rezim otoriter bergantung pada keberhasilannya dalam memanfaatkan tiga pilar stabilitas untuk membuat masyarakat menerima *status quo* yaitu: represi (penggunaan ancaman dan paksaan), kooptasi (memberikan manfaat bagi kelompok tertentu untuk meyakinkan mereka agar tidak mempertanyakan sistem), dan legitimasi (membuat orang membenarkan, menerima, atau setidaknya menoleransi rezim saat ini) (Gerschewski 2013). Tiga pilar ini tidak ada sejak awal, tetapi dikembangkan dari waktu ke waktu oleh Lukashenko demi mempertahankan otoritarianismenya.

2.2.1 Legitimasi

Pemerintahan yang otoriter mencoba menciptakan persepsi legitimasi untuk tatanan politik mereka berdasarkan gagasan tentang apa yang sebenarnya diwakili oleh rezim, seperti ideologi politik, agama, nasionalisme, atau kualitas pemimpin tertentu (Gerschewski 2013). Dalam

kasus Belarus, Alexander Lukashenko memanfaatkan narasi mengenai dirinya sebagai '*Batka*' atau 'Bapak' dalam bahasa Belarus, dan penguasa yang jujur yang memerintah negaranya dengan tangan yang kuat. Lukashenko mengembangkan narasi bahwa dia adalah pemimpin yang pro-rakyat sejak awal mencalonkan diri sebagai presiden. Pada tahun 1994, Alexander Lukashenko merupakan anggota parlemen yang kurang dikenal. Lukashenko berkampanye dengan membawa agenda pemerintahan anti-korupsi karena sebelumnya menjabat sebagai ketua *Supreme Soviet's Commission on Corruption*, dan membawa Belarus kembali ke kehidupan yang lebih sejahtera, aman, dan sederhana. Dengan melakukan itu, Lukashenko menyuarakan rasa frustrasi rakyat biasa karena korupsi yang merajalela di pemerintahan pasca-Soviet. Kepada para rakyat, dalam kampanye pemilihan Lukashenko berjanji untuk mengambil rampasan dari tangan elit pemerintahan pasca-Soviet dan mengembalikannya ke masyarakat. Ketegangan antara elit dan rakyat biasa telah berlangsung lama di Belarus. Pidato-pidatonya menyatakan bahwa sebagai "calon rakyat", Lukashenko akan membela kepentingan rakyat dengan menggagalkan korupsi, membersihkan "pencuri dan pemalas" dari pemerintahan dan memulihkan "keadilan" di pasar yang baru dibuka. Retorika ini membuat masyarakat merasa bahwa mereka mendapatkan kembali kendali atas masa depan mereka (Manaev, Mnayeva and Yuran 2011).

Alasan lain yang membuat Lukashenko menang dalam pemungutan suara yang bebas pada tahun 1994 adalah Lukashenko tidak

terkait dengan pembentukan partai atau oposisi. Lukashenko juga meyakinkan masyarakat Belarus bahwa hubungan dengan Rusia akan dipertahankan dan diperkuat. Banyak masyarakat Belarus tidak yakin dengan masa depan mereka sebagai sebuah negara merdeka. Hubungan dengan Rusia tentunya menawarkan beberapa keamanan. Pada tahun 1994, hanya sedikit indikasi yang menunjukkan bahwa Lukashenko memiliki nafsu terhadap kekuasaan atau keinginan untuk menjungkirbalikkan lembaga-lembaga negara dan mengamandemen konstitusi (Maples 2021).

Alexander Lukashenko ingin mempertahankan legitimasi publik dengan retorika populis yang sesuai dengan keprihatinan masyarakat Belarus selama masa transisi awal setelah kemerdekaan. Sebagai ketua komite parlemen anti-korupsi, Lukashenko menyebut lawan politiknya sebagai koruptor dan menyusun pesan politik yang menarik sentiment mayoritas tentang isu-isu kebijakan ekonomi dan identitas nasional (Maples, Belarus: A Denationalized Nation 1999). Populisme terbukti populer di Belarus. Suara pro-Lukashenko sangat kuat di pedesaan dan di kota-kota kecil. Pendukung Lukashenko juga kuat di daerah pemukiman di kota-kota besar yang merupakan rumah bagi banyak pekerja industry (Ioffe, Lukashenka's Rise to Power and Belarusian Politics 2014, 131).

Untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap pemerintah, Lukashenko membangun citra yang kuat sebagai pemimpin yang dapat melindungi Belarus dari ancaman eksternal dan dapat mencegah dislokasi ekonomi dan sosial. Menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil ketika masa awal kepresidenannya, Lukashenko mengambil kendali atas

lembaga-lembaga negara dan asset-aset negara serta mulai menyerang perusahaan-perusahaan yang mendanai oposisi dengan menggunakan penegakan hukum dan mengaudit lembaga-lembaga negara. Dengan latar belakang ini, Lukashenko juga kemudian mereformasi institusi untuk memperkuat kekuasaan kepresidenannya dengan diadakannya serangkaian referendum pada tahun 1995 dan 1996. Terlepas dari sejumlah penyimpangan, persetujuan publik atas reformasi ini mencerminkan persetujuan umum mayoritas dalam pembentukan sebuah model baru pemerintahan pasca-Soviet (Trantidis, Building an authoritarian regime: Strategies for autocratisation and resistance in Belarus and Slovakia 2021).

Membangun basis legitimasi yang kuat sangat penting bagi rezim otoriter. Negara-negara otoriter populis cenderung mengandalkan kontrak sosial, yaitu hubungan timbal balik yang menjamin persetujuan politik dengan imbalan kinerja ekonomi yang relatif dapat diterima. Semakin baik kinerja pemerintah otoriter populis secara ekonomi, sosial, dan dalam hal ketertiban umum, semakin sah kekuasaannya dimata masyarakat (Gerschewski 2013). Seiring dengan pertumbuhan lapangan kerja, Alexander Lukashenko berhasil mengkonsolidasikan semua cabang kekuasaan ditangannya. Lukashenko mencapai puncak popularitasnya pada tahun 2006. Hampir 59% responden dari jajak pendapat nasional yang dilakukan tepat sebelum pemilihan tahun 2006 mengatakan bahwa mereka akan memilih Lukashenko. Pada tahun 2006, Alexander Lukashenko mampu memenuhi harapan para pemilih yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan finansial. Jajak pendapat

yang dilakukan oleh IISEPS (*Independent Institute of Socio Economic and Political Studies*) yang dilakukan satu bulan sebelum pemilu tahun 2006 menunjukkan bahwa demokratisasi dan kemerdekaan di Belarus hanya menjadi perhatian kelima bagi para pemilih di Belarus. Faktor utama yang mendominasi adalah standar hidup umum, kenaikan harga, peningkatan sektor kesehatan, dan lapangan kerja. Oleh karena itu, kampanye oposisi yang dibangun diatas advokasi demokrasi dan kebebasan, jelas akan gagal. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang stabil, standar hidup yang meningkat, serta pembayaran gaji dan pensiun yang terus meningkat oleh pemerintah di negara bagian, dimana sekitar 80% industri tetap berada ditangan negara, menentukan popularitas dan legitimasi Lukashenko dimata masyarakat Belarus (Nechyparenka 2011, 14-15).

Salah satu cara Alexander Lukashenko melegitimasi tatanan politiknya saat ini adalah dengan membandingkan dirinya dengan oposisi politiknya. Dengan menyoroti kegagalan oposisi untuk mencapai perubahan dan menggambarkannya sebagai ancaman terhadap stabilitas yang dijamin oleh rezim saat ini, otoritas Belarus mendukung dominasi berkelanjutan Lukashenko atas Belarus. Taktik yang digunakan Lukashenko ini berhasil. Banyak masyarakat Belarus yang menganggap aktor oposisi sendiri yang harus disalahkan atas represi yang sering mereka hadapi. Aktor oposisi dipandang sebagai pembuat onar yang terus bersikeras menantang rezim meskipun mereka tahu itu akan menimbulkan masalah. Selain itu, pihak oposisi dikonstruksi sebagai ancaman tidak hanya bagi tatanan politik tetapi juga bagi identitas nasional (Bedford

2021). Perjuangan oposisi dalam melawan rezim otoriter begitu erat kaitannya dengan perjuangan untuk identitas Belarus. Grigory Ioffe (2003) menggambarkan kaum nasionalis oposisi sebagai orang yang arogan dan mencoba memaksakan identitas nasional Belarus yang tidak pernah benar-benar ada. Contohnya adalah oposisi bersikeras bahwa berbicara bahasa Belarus adalah satu-satunya cara untuk menjadi *Belarusian*. Hal ini membuat oposisi nasionalis dijauhi dan tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat Belarus yang lebih suka berbicara bahasa Rusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, strategi Lukashenko untuk menyoroti kegagalan oposisi karena memiliki konsep bangsa yang berbeda ini mulai berubah. Lukashenko mulai menekankan dan mempromosikan bahasa dan budaya Belarus dengan berbagai cara dan bahkan memperkenalkan bagian dari warisan dari *Belarusian National Republic* (BNR) dalam retorika politiknya. Perubahan ini membuat aspek identitas oposisi menjadi tidak terlalu mengintimidasi. Masalah bahasa dan identitas Belarus tidak lagi menjadi kontroversi. Strategi *soft Belarusianisation* ini digambarkan sebagai upaya untuk menarik diri dari Rusia ketika Lukashenko ingin meningkatkan hubungan Belarus dengan Uni Eropa dan sekaligus cara untuk membuat legitimasi rezimnya lebih sah secara politik di dalam negeri tanpa harus menyimpang dari orientasi otoriter (Rudkouski 2017).

2.2.2 Represi

Represi merupakan salah satu tulang punggung otokrasi dan bahkan disebut sebagai ciri khas dari rezim otokrasi. Hingga tahun 2020,

represi yang terjadi di Belarus mayoritas berbentuk selektif yang secara tradisional menargetkan oposisi, aktivitis sipil, jurnalis, dan masyarakat maupun kelompok yang mempertanyakan sistem. Dalam kasus-kasus individual, represi politik yang terjadi di Belarus sangat parah, seperti kasus penghilangan empat aktivis politik pada tahun 1999 dan 2000. Aksi protes yang terjadi pasca pemilu tahun-tahun berikutnya di ibukota Minsk juga sangat brutal dan penuh kekerasan. Namun, rezim Lukashenko telah berhasil mengamankan keberlangsungan kekuasaannya dengan menetralsir setiap ancaman potensial sebelum menjadi kenyataan dan secara efisien menyingkirkan oposisi politik (Bedford 2021).

Alexander Lukashenko melakukan serangkaian pergantian personel untuk memastikan bahwa orang-orang disekitarnya memang orang yang setia dan tidak berkhianat. Lukashenko juga mengirim pesan yang jelas kepada calon lawan politiknya. Pada tahun 2002, dua mantan calon presiden yang merupakan direktur perusahaan industri besar yaitu Mikhail Leonau dan Leonid Kaluhin ditangkap dan didakwa atas penggelapan dana negara. Kandidat ketiga yaitu mantan duta besar Belarus untuk Latvia yaitu Mikhail Marynich juga ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan palsu. Selain itu, pengadilan Belarus menghukum Mikola Markevich dan Pavel Mazheika dari surat kabar independent *Pahonya* ke penjara karena diduga mencemarkan nama baik Lukashenko selama kampanye presiden. Jurnalis Viktor Ivashkevich yang merupakan pemimpin redaksi surat kabar independent *Rabochy* juga didakwa atas pencemaran nama baik karena menuduh Lukashenko dan pemerintahannya melakukan korupsi. Disisi

lain, pemerintah Lukashenko terus memperluas kendalinya atas masyarakat sipil Belarus karena organisasi non-pemerintah dipandang menyembunyikan pendukung oposisi dan membantu memberikan pendanaan. Dalam upaya untuk membatasi kegiatan masyarakat sipil, semua partai politik, serikat pekerja, dan LSM diminta untuk melapor ulang pada tahun 2000. Pembatasan ketat kemudian dilakukan terkait penerimaan dana oleh LSM dari luar negeri. Dengan berkurangnya sumber daya yang dimiliki oleh beberapa kelompok hak asasi manusia, banyak organisasi kemudian menjadi kurang efektif, atau bahkan menghilang begitu saja (Burger and Minchuk 2006, 32).

Konsolidasi kekuasaan Lukashenko terus berlanjut dengan adanya kontrol atas Komisi Pemilihan Pusat Belarus (CEC), KGB RB (*intelligence agencies*), pengadilan, baik Kementerian Kehakiman dan Dalam Negeri, media, dan lembaga lainnya. Hanya dalam waktu tiga tahun sejak 2001, oposisi demokratis, LSM yang memiliki daya tarik masyarakat yang lebih luas, atau individu yang cenderung mengeluh tentang tidak adanya mekanisme demokratis untuk memastikan pemungutan suara yang adil telah dibungkam secara efektif (Burger and Minchuk 2006, 33). Represi yang dilakukan oleh rezim otokratis selalu diwarnai dengan pelecehan kandidat oposisi dan media. Represi yang dilakukan oleh pemerintah Belarus terhadap media independen dimulai pada tahun 1996, ketika rezim menutup stasiun FM swasta pertama di Belarus. Ketika pemilu 2001 berlangsung, pemerintah Belarus mengambil kendali atas semua siaran radio dan televisi domestik. Sebelum pemilu selanjutnya

pada tahun 2006, pemerintah kemudian menargetkan surat kabar independen. Pers milik oposisi nyaris tidak bisa menjangkau pemilih (Nechyparenka 2011).

Namun, represi sendiri dianggap tidak cukup untuk mempertahankan sistem otoritarianisme. Represi keras tidak terlalu dibutuhkan di negara otoriter khususnya dalam kasus Belarus karena kepercayaan massa dapat dimanipulasi dengan melakukan *censorship*, kooptasi, dan propaganda (Guriev and Treisman 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Belarus berusaha mengurangi keterlibatan langsung dalam penggunaan kekerasan terhadap individu yang berpikiran oposisi. Oleh karena itu, otoritarianisme yang ada di Belarus seringkali digambarkan dengan istilah yang lunak seperti “adaptif” dan “pragmatis”. Ketika Uni Eropa ingin melakukan pendekatan terhadap rezim Lukashenko setelah krisis Ukraina dengan memulai dialog tentang pencabutan sanksi dan merundingkan program liberalisasi visa, otoritas Belarus bersikap pragmatis. Pemerintah Belarus berusaha menghindari hukuman penjara atau kekerasan langsung terhadap oposisi dan bahkan membebaskan semua tahanan politik yang tersisa pada tahun 2015. Sebagai balasannya, Dewan Uni Eropa kemudian menghapus sebagian sanksi yang dijatuhkan kepada Belarus (Bedford 2021, 813).

Pendekatan pemerintah Belarus yang pragmatis ini disebut “*controlled openness*” dimana aktivisme dan partisipasi sipil pada tingkat tertentu diperbolehkan selama tidak secara langsung dan eksplisit bersifat politis. Sebagian masyarakat Belarus terlibat secara aktif dalam berbagai jenis

kegiatan seperti akademisi, kegiatan budaya, dan gerakan lingkungan. Masyarakat Belarus tidak sepenuhnya pasif meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam isu politik. Keterlibatan masyarakat Belarus terjadi di zona abu-abu dimana mereka tidak sepenuhnya menerima atau secara resmi mempertanyakan sistem yang ada (Bedford 2021, 814).

2.2.3 Kooptasi

Kooptasi dalam rezim otoriter mengacu pada kemampuan untuk menyertakan aktor-aktor yang relevan secara strategis kedalam rezim melalui struktur kelembagaan serta keterlibatan dalam korupsi dan klientelisme (Gerschewski 2013, 22-23). Institusi seperti parlemen dan lembaga yudikatif dapat menghalangi pergerakan rezim otoriter. Selain melibatkan kelompok elit dalam politik, bisnis, media, serikat buruh, masyarakat sipil, dan akademisi dalam proses pemilu, kooptasi harus melibatkan penggunaan klientelisme (kedekatan) untuk memberikan penghargaan kepada pendukung dan menghukum mereka yang mengungkapkan perbedaan pendapat dengan memberikan sanksi atau pengecualian. Kooptasi juga berjalan dengan penggunaan langsung sumber daya negara untuk mempengaruhi preferensi pemilih misalnya melalui propaganda (Trantidis, Building an authoritarian regime: Strategies for autocratisation and resistance in Belarus and Slovakia 2021, 4).

Dalam masa pertamanya menjabat, Lukashenko mempromosikan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dan pada tahun-tahun berikutnya kemudian menandatangani sejumlah perjanjian dengan Presiden Rusia

Boris Yeltsin yang menyerukan berbagai bentuk persatuan antara kedua negara. Penjelasan yang paling umum didengar untuk sistem Belarus yang bertahan dan berkembang selama lebih dari 26 tahun adalah ketergantungannya pada kooptasi, yang berbentuk kontrak sosial model Soviet antara Lukashenko dan masyarakat Belarus yang menjamin stabilitas, ketertiban, dan keamanan finansial sebagai ganti dari kesetiaan mereka. Jadi, kontrak sosialnya adalah perjanjian implisit antara negara dan masyarakat dimana para pihak sedikit banyak menyadari keuntungan dan kerugian dari perilaku mereka (Haiduk 2009, 9).

Karena berbagai kelompok penduduk memiliki kebutuhan yang berbeda, manfaat yang diberikan juga berbeda, tetapi sebagian besar kontrak memberikan kesempatan untuk mencari pekerjaan, mensubsidi beberapa harga dan tarif, serta menawarkan berbagai pelayanan gratis. Sistem ini didasarkan pada pendapatan dari gas alam dan minyak mentah yang disubsidi secara besar-besaran oleh Rusia, sehingga memungkinkan Belarus untuk menjalankan industri dalam negeri dengan harga yang murah dan menghasilkan pendapatan dengan mengekspor kembali produk minyak sulingan ke Eropa Barat. Krisis keuangan global, ekonomi Rusia yang memburuk akibat sanksi pendudukan Krimea, dan penurunan harga minyak telah berdampak besar pada situasi sosial ekonomi di Belarus serta kemampuan negara untuk menyediakan tingkat kesejahteraan dan kestabilan keuangan yang sama bagi masyarakat Belarus seperti sebelumnya. Resesi 2015-2016 menghantam Belarus dengan sangat keras. Pendapatan riil turun secara signifikan, dan lebih banyak rumah tangga

yang diklasifikasikan sebagai kelompok berpenghasilan rendah menunjukkan bahwa populasi menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan. Sebelumnya, PDB per kapita terus meningkat, tetapi selama tahun 2014-2019, pertumbuhannya nol persen (Guriey 2020, 274).

Bahkan sekarang, upah rata-rata belum meningkat dan kesenjangan pendapatan antara ibukota Minsk dan daerah lain semakin meningkat. Pembayaran pensiun juga mengalami stagnasi dan tidak meningkat sejalan dengan inflasi yang konstan. Sebagian besar pensiunan memang tidak hidup dalam kemiskinan ekstrem, tetapi yang terpenting, mereka tidak memiliki standar hidup yang tinggi seperti sebelumnya (Bedford 2021, 811). Alexander Lukashenko berusaha mencoba untuk memperkenalkan kontrak keamanan yang menjamin kemerdekaan dan keselamatan nasional warga negara daripada manfaat sosial dan keuangan. Hal ini tidak mengherankan, karena pada kenyataannya lebih banyak dana yang masuk ke pegawai pemerintahan khususnya anggota aparat keamanan daripada memperkuat sektor kesejahteraan sosial. Upaya untuk mereformasi sistem jaminan sosial dalam menanggapi tantangan internal dan eksternal tidak membuahkan hasil dan sistem saat ini telah digambarkan sebagai sistem yang rapuh dan menyedihkan. Tidak dapat dihindari bahwa Lukashenko sebagai "*Bapak Negara*" disalahkan atas hal ini (Bedford 2021, 811). Banyak analis menunjukkan bahwa alasan Lukashenko tidak menerapkan reformasi yang diperlukan untuk memperkuat ekonomi adalah karena hal itu akan melemahkan posisinya sendiri. Bahkan Lukashenko menolak perubahan karena dia secara pribadi berpikir bahwa ekonomi pasar secara

ideologis tidak dapat diterima (Moshes and Nizhnikau, *The Belarusian Paradox: A Country of Today Versus a President of the Past* 2019, 6).

Lembaga demokrasi seperti parlemen, partai, atau pemilu memiliki fungsi vital untuk mengkooptasi elit strategis dari jajaran bisnis atau militer. Untuk menghindari situasi dimana suatu aktor tumbuh terlalu kuat, sangat penting untuk menjaga stabilitas otokrasi dengan mengikat semua aktor yang relevan dengan rezim agar mereka tidak mempertanyakan sistem. Media menjadi sasaran Lukashenko sebagai mesin propaganda dan kampanye politik. Perusahaan Televisi dan Radio Belarus (Belteleradiocompany/BTRC) tetap menjadi monopoli negara. Lisensi media ditawarkan kepada orang-orang yang setia kepada pemerintah sementara subsidi negara mendukung media yang ramah politik. Semua editor surat kabar yang didukung negara diberi status sebagai pegawai negeri. Lukashenko juga mengontrol TV pemerintah yaitu ANT, LAD, NTV, serta STV Belarus. *The State Committee for Information Control* juga berada langsung dibawah presiden dan bukan dibawah KGB RB (lembaga intelijen Belarus). Penyedia layanan internet lokal harus beroperasi melalui Beltecom milik negara (Wilson 2011, 218).

Dalam ekonomi yang didominasi negara, pers swasta harus bertahan tidak hanya dari pembatasan langsung pemerintah tetapi juga kekurangan dana dan iklan. Perusahaan swasta berada di bawah tekanan untuk tidak memasang iklan di media independen. Dengan sedikitnya media independen yang mengekspos perilaku politik Lukashenko, rezimnya dapat melecehkan oposisi, pers, dan organisasi masyarakat sipil tanpa

merusak citra publiknya. Pelaku sosial ekonomi dihadapkan pada sistem kontrol pemerintah yang luas. Mayoritas penduduk bekerja untuk perusahaan negara atau milik negara dimana pemerintah memiliki kekuasaan untuk mempekerjakan dan memecat secara bebas (V. Silitski 2005, 92).

Kredit hampir seluruhnya dipasok oleh bank-bank yang dikendalikan pemerintah. Perlindungan hak milik yang buruk semakin menghambat perkembangan bisnis swasta yang otonom. Peran dominan negara dalam perekonomian, terutama dibantu oleh sewa energi dari Rusia, memungkinkan pemerintah untuk melanjutkan kooptasi skala besar. Oposisi di Belarus tidak dapat memobilisasi dukungan yang lebih luas saat beroperasi dalam ekonomi yang tetap tidak direformasi, dikendalikan oleh negara, dan didukung oleh akses preferensial ke pasar Rusia dan bantuan ekonomi langsung dari Rusia. Kooptasi yang meluas merampas kesempatan oposisi untuk merekrut pendukung dan mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk meluncurkan kampanye politik yang efektif. Setelah mendahului tantangan politik yang cukup besar, agenda Lukashenko untuk melakukan reformasi institusional disetujui oleh para pemilih dan berkontribusi pada lingkaran otokratisasi, pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif dan melemahkan parlemen dan yudikatif (Trantidis, *Building an authoritarian regime: Strategies for autocratisation and resistance in Belarus and Slovakia 2021*, 16).

BAB III

ANALISIS FAKTOR TERJADINYA KRISIS POLITIK DI BELARUS PADA TAHUN 2020

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai sejarah otoritarianisme dan faktor yang mempengaruhi bertahannya kekuasaan Presiden Alexander Lukashenko. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai analisis krisis politik yang terjadi di Belarus pada tahun 2020 dengan menggunakan teori *structural violence* oleh Johan Galtung. Galtung menjelaskan ada tiga konsep kekerasan atau yang disebut *triangle of violence*. Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa, kekerasan struktural adalah proses dengan pasang surut, dan kekerasan budaya adalah invariant (tidak berubah) atau bersifat permanen (Galtung 1990, 294). Galtung membingkai istilah kekerasan struktural untuk merujuk pada suatu keadaan dimana kekerasan dibangun dalam sebuah struktur atau institusi seperti pemerintah, yang melahirkan ketidaksetaraan kekuasaan dan mengakibatkan peluang hidup yang tidak setara. Akses yang tidak setara terhadap sumber daya, kekuasaan politik, pendidikan, perawatan kesehatan, atau kedudukan hukum adalah bentuk-bentuk kekerasan struktural. Sayangnya, mereka yang menjadi korban kekerasan struktural pun seringkali tidak menyadari penderitaan mereka diatur secara sistematis oleh distribusi sumber daya masyarakat yang tidak merata dan tidak adil.

Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai penyebab dari adanya perbedaan atau ketidakseimbangan antara potensial dan aktual, sehingga peningkatan kekerasan mungkin terjadi dengan adanya peningkatan potensi dan turunnya tingkat aktual. Misalnya jika seseorang meninggal karena tuberkulosis

pada abad ke-18, sulit untuk menganggap ini sebagai kekerasan karena hal ini mungkin sangat tidak dapat dihindari. Tetapi jika seseorang meninggal karena tuberculosis hari ini, terlepas dari semua sumber daya medis di dunia, maka kekerasan hadir. Dengan kata lain, ketika potensi lebih tinggi dari aktual ketika hal itu dapat dihindari, maka kekerasan hadir. Dengan demikian, tingkat realisasi potensial dimungkinkan dengan tingkat wawasan dan sumber daya tertentu. Jika wawasan atau sumber daya dimonopoli oleh kelompok dan digunakan dengan tujuan lain, maka tingkat aktual berada di bawah tingkat potensial dan kekerasan hadir dalam sistem (Galtung 1969, 168-169).

Belarus telah dicirikan dengan otoritarianisme yang kuat selama seperempat abad terakhir. Namun, demonstrasi yang mampu membuat rezim goyah meletus pada tahun 2020, setelah periode liberalisasi politik dan ekonomi yang terbatas, pemulihan hubungan dengan Barat, dan jarak yang lebih jauh dari Rusia mulai tahun 2014 (Carboni 2021). Kekerasan struktural dapat terlihat dari rasa tidak aman yang disebabkan oleh pemerintah Belarus dengan adanya kebijakan otoriter yang merugikan masyarakat Belarus sehingga memicu terjadinya krisis politik di Belarus.

Maka dari itu, dengan menggunakan teori kekerasan struktural oleh Johan Galtung, ada enam dimensi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kekerasan struktural. Dalam kekerasan struktural, terdapat subjek (aktor yang bertidak, biasanya memiliki kedudukan yang tinggi dalam sistem), objek (korban, bisa merupakan individu atau kelompok yang kedudukannya lebih rendah dari subjek dalam sistem), tindakan (baik yang terlihat atau *manifest*, maupun yang tersembunyi atau *latent*), kekerasan fisik dan kekerasan psikologis,

motivasi atau dorongan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan baik itu disengaja (*intended*) atau tidak disengaja (*unintended*), dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan positif atau pendekatan negatif (Galtung 1969, 169-172).

3.1 Subjek

Subjek adalah aktor yang bertindak untuk menyebabkan kekerasan dan biasanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam sebuah sistem. Galtung menjelaskan bisa jadi tidak ada aktor atau agen tertentu yang menyebabkan kekerasan. Misalnya, struktur dan praktik ekonomi mungkin mengakibatkan individu atau kelompok tertentu dirugikan (dan, karenanya, mengalami kekerasan) tanpa ada aktor atau agen yang mengatur terjadinya kekerasan tersebut. Misalnya, jika orang mengalami kelaparan ketika hal ini dapat dihindari, maka kekerasan terjadi, terlepas dari apakah ada hubungan subjek-tindakan-objek yang jelas (Galtung 1969, 171). Kekerasan struktural hampir selalu tidak terlihat, karena tertanam dalam struktur sosial dan dinormalisasi oleh institusi. Adanya ketidaksetaraan yang terstruktur menyebabkan penderitaan bahkan kematian seperti kekerasan langsung, meskipun kerusakan yang diakibatkan oleh kekerasan struktural lebih lambat, lebih halus, lebih umum, dan lebih sulit untuk diperbaiki. Kekuasaan untuk memutuskan distribusi sumber daya tidak merata atau hanya diputuskan oleh satu orang yang memonopoli pengambilan keputusan.

Kekerasan dibangun dalam struktur itu sendiri, yang dalam hal ini dilakukan oleh Presiden Alexander Lukashenko sehingga melegitimasi posisinya sebagai subjek sesuai konsep kekerasan struktural. Posisi Presiden Alexander

Lukashenko sebagai aktor yang memiliki otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan sehingga secara struktur berada pada tingkat paling atas. Hal ini terlihat dari pembagian kekuasaan di Belarus yang tidak seimbang dan peluang hidup yang tidak sama. Setelah adanya referendum pada November 1996 dimana legitimasinya banyak dipertanyakan oleh masyarakat Belarus dan masyarakat internasional, konstitusi Belarus direvisi atau diamandemen untuk semakin memperluas kekuasaan presiden. Hal ini membuat Presiden Alexander Lukashenko yang terpilih sebagai presiden pertama memperoleh hak untuk memperpanjang masa jabatannya dan untuk memerintah dengan dekrit presiden. Setelah konstitusi diamandemen, kekuasaan parlemen yaitu Majelis Nasional bikameral juga sangat berkurang. Di bawah konstitusi, presiden yang merupakan kepala negara dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Presiden memilih Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan dan disetujui oleh Parlemen, tetapi pada kenyataannya malah merupakan bawahan dari presiden. Majelis Nasional Belarus terdiri atas *Supreme Council of the Republic of Belarus* (Dewan Republik) dan *House of Representatives* (Dewan Perwakilan Rakyat). Anggota *Supreme Council of the Republic* menjabat selama empat tahun dimana sebagian besar dipilih oleh dewan regional, tetapi beberapa juga ada yang ditunjuk oleh Presiden. Separuh hakim diangkat oleh Presiden, dan separuhnya dipilih oleh Dewan Republik (Rostovtsev 2021).

Hal ini membuat pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki Presiden Alexander Lukashenko sangat mendominasi dalam struktur pemerintahan Belarus. Konsolidasi kekuasaan terus dilakukan oleh Lukashenko dengan dilaksanakannya beberapa kali referendum yang akan membuatnya tetap berkuasa. Karenanya

sistem *check and balance* di Belarus tidak berjalan dengan baik karena Lukashenko sebagai aktor utama yang berada ditingkat paling tinggi dalam struktur pemerintahan Belarus mengatur semuanya.

3.2 Objek

Galtung menjelaskan mengenai dimensi selanjutnya yaitu ada atau tidaknya objek yang terluka baik secara fisik maupun secara psikologis. Ketika suatu individu, kelompok, atau negara melakukan kekerasan langsung seperti melempar batu atau uji coba senjata nuklir, boleh jadi tidak ada kekerasan dimana seseorang dipukul atau dilukai, tetapi tetap ada ancaman fisik dan ancaman tidak langsung dari kekerasan mental yang dikategorikan sebagai kekerasan psikologis karena membatasi tindakan manusia (Galtung 1969, 170). Hal ini berarti, rasa tidak aman karena adanya ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan objek mengalami kekerasan. Kekerasan struktural sudah ada dalam sistem atau struktur itu sendiri sehingga yang menjadi objek adalah aktor atau agen, baik individu maupun kelompok atau masyarakat yang menjadi bagian dari sistem atau struktur itu sendiri. Dalam hal ini, yang diklasifikasikan sebagai objek adalah masyarakat Belarus yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan karena operasi yang dilakukan oleh Presiden Alexander Lukashenko dalam pemerintahannya.

3.3 Tindakan (*Manifest dan Latent*)

Galtung menjelaskan ada dua tingkat kekerasan yaitu *manifest* dan *latent*. *Manifest* adalah suatu keadaan dimana kekerasan yang ada dapat diamati sehingga ketika kekerasan terjadi akan tampak dan diidentifikasi sebagai sebuah tindakan

kekerasan. Sedangkan *latent* adalah suatu keadaan dimana kekerasan yang ada tersembunyi atau keadaan yang tidak menunjukkan adanya kekerasan, namun ada kemungkinan kekerasan tersebut akan hadir (Galtung 1969, 172). Dalam kasus ini, kekerasan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara potensi dan realisasi aktual. Presiden Alexander Lukashenko sebagai subjek tidak berhasil menghindari potensi kekerasan sehingga kekerasan itu hadir dalam sistem pemerintahannya yang telah dibangun bertahun-tahun.

Galtung menjelaskan bahwa kekerasan *latent* hadir ketika situasinya begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi yang sebenarnya mudah menurun. Pada awal Lukashenko terpilih menjadi Presiden, tidak ada yang menyangka dia akan mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara. Citra yang dibangun oleh Lukashenko adalah seseorang yang jujur dan akan memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Lukashenko memanfaatkan kooptasi, legitimasi, dan represi sebagai strategi utama dalam mempertahankan otoritarianismenya. *Manifest* dapat terlihat karena kekerasan itu nyata dan dapat diidentifikasi dengan jelas. Gejolak politik yang terjadi pada negara tetangga seperti Ukraina dengan *Orange Revolution* pada tahun 2004 membuat masyarakat Belarus ikut tergerak. Meski tidak banyak, kerumunan lima sampai sepuluh ribu orang berkumpul di October Square. Pemilu tahun 2006 dan 2010 menandai puncak protes oleh pihak oposisi pada saat itu. Jumlah massa yang berkumpul pada Desember 2010 diperkirakan sekitar 40.000 orang. Represi resmi yang dilakukan oleh negara mencapai puncaknya pada tahun 2011, saat KGB memasuki apartemen dan mengambil laptop dari tokoh oposisi. Protes jalanan

dilarang, dan orang-orang terpaksa bertepuk tangan untuk mengekspresikan protes mereka (Maples 2021, 285).

Pada 2015, pemilihan presiden berjalan lancar tidak seperti tahun 2010. Meskipun demikian, aksi protes yang sebagian besar tidak terorganisir terjadi di Minsk tidak lama setelah pemungutan suara ditutup. Namun, para pengunjung rasa dengan cepat membubarkan diri ketika dihadang oleh polisi (Crabtree, Fariss and Schuler 2016). Dari peristiwa pemilu ini, bisa dilihat bahwa masyarakat Belarus perlahan mulai berubah. Perkembangan yang terjadi di Belarus ini menunjukkan betapa rentannya sebuah rezim otoriter ketika legitimasinya dipertanyakan secara terbuka. Kemenangan dalam pemilu didapatkan Lukashenko dalam kampanye yang dikelola dengan hati-hati. Komisi lokal semuanya dipimpin oleh pendukung Lukashenko. Pemilu telah menjadi ritual lima tahun sebagai sarana untuk menunjukkan kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat bahwa nyawa demokrasi hadir di Belarus. Namun hasilnya sudah ditentukan sebelumnya dan tidak mencerminkan pemilihan umum yang sebenarnya (Maples 2021, 285).

Alexander Lukashenko tidak mempertahankan pemerintahannya sendirian. Lukashenko memiliki sekelompok elit di kabinetnya dan di jabatan Menteri utama. Lukashenko juga mempromosikan putra-putranya yang lebih tua ke posisi penting dalam pasukan keamanan dan dalam organisasi olahraga yang terkait erat dengan struktur negara. Ketika sumber daya dan kekuasaan dikelola oleh suatu kelompok atau aktor tertentu dan digunakan untuk memenuhi tujuannya, maka potensial lebih tinggi dari tingkat realisasi aktual dan kekerasan hadir dalam sistem. Lukashenko menanggapi demonstrasi jalanan dengan keras, membuat kekuatan KGB seperti pada masa Soviet, dan memberikan perhatian khusus

kepada tentara sebagai penjamin stabilitas negara (Maples 2021, 286). Hal ini membuktikan bahwa dampak dari monopoli kekuasaan yang dimiliki oleh Lukashenko merupakan kekerasan yang tampak dan dapat diobservasi sehingga menghasilkan kekerasan dari struktur yang pada awalnya tersembunyi dalam sistem, lalu kemudian terlihat dan nyata melalui aksi dan kebijakan represif yang dilakukan oleh rezimnya yang merugikan masyarakat Belarus.

3.4 Kekerasan Fisik dan Kekerasan Psikologis

Johan Galtung menjelaskan ada dua jenis kekerasan yang dirasakan oleh objek yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik menyebabkan manusia disakiti secara jasmani sampai pada titik pembunuhan. Kekerasan fisik membatasi pergerakan manusia sehingga menyebabkan suatu situasi dimana akses dan pemenuhan kebutuhan menjadi terbatas (Galtung 1969, 169). Hal ini dapat terlihat dari analisis kerangka hukum dimana aktivisme sosial yang beroperasi selama kampanye pemilu tahun 2006 dan 2010 menunjukkan bahwa pemerintah Belarus melakukan segala upaya yang mungkin dilakukan untuk mengkriminalisasi setiap aksi protes anti-pemerintah (Lavrinenko 2015, 128). Setelah pemilihan Presiden tahun 2006 dan 2010, beberapa calon Presiden dan aktivis politik terkemuka menerima hukuman penjara. Pada tahun 2017, pihak berwenang menyelenggarakan persidangan terhadap aktivis serikat pekerja independen. Pada tahun 2018, jurnalis media independen, portal internet Tut.by dan Belsat TV menghadapi dakwaan dan diadili (Moshes and Nizhnikau 2019).

Memburuknya iklim politik kemudian memuncak dalam pemilihan umum pada tahun 2020 yang tidak bebas dan tidak adil. Ledakan kekerasan represif

terjadi ketika masyarakat Belarus menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap hasil pemilu yang diumumkan. Protes damai disambut oleh otoritas pemerintah dengan kekerasan. Penangkapan ribuan orang, aktivis, dan jurnalis telah dilakukan oleh otoritas yang berkuasa. Kekerasan digunakan terhadap pengunjuk rasa, pengamat, dan jurnalis. Otoritas Belarus menggunakan granat kejut, gas air mata, peluru karet, dan meriam air yang menyebabkan cedera serius. Di pusat-pusat penahanan, banyak laporan oleh para korban yang ditangkap bahwa mereka merasakan berbagai kekerasan fisik karena adanya penyiksaan dan kekerasan seksual. Mereka ditahan di ruangan yang tidak manusiawi, penuh sesak, tidak higienis dimana tidak tersedia toilet dan bahkan tidak diberi makanan dan minuman. Pelecehan berbasis gender yang menargetkan aktivis perempuan secara khusus juga terjadi. Lebih dari 7.000 pengunjuk rasa telah ditangkap dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka akibat senjata yang digunakan oleh pihak berwenang terhadap pengunjuk rasa. Setidaknya dua orang telah meninggal akibat penyiksaan yang dilakukan oleh otoritas Belarus. Semua ini terjadi secara sistematis sebagai metode hukuman dan intimidasi (Kolarzik and Terzyan 2020).

Sejak pemilu, jurnalis terus menjadi target kekerasan dan penganiayaan oleh pemerintah Belarus. Penangkapan terus dilakukan oleh otoritas Belarus dan menurut organisasi hak asasi manusia Viasna, ada 421 tahanan politik mulai dari blogger hingga pengusaha, masyarakat yang melakukan aksi protes dengan damai, dan oposisi politik. Persidangan bermotif politik juga dilakukan pada ratusan orang secara tertutup dan tanpa proses hukum yang adil. Banyak pengacara aktivis juga telah dicabut lisensi praktiknya. Selama krisis politik terjadi, rezim telah menculik, memenjarakan, dan mengusir hampir semua pemimpin oposisi di

Belarus. Kandidat oposisi yang dipenjara sejak tahun 2020 adalah Viktor Babaryko yang merupakan mantan ketua Belgazprombank, dan Siarhei Tsikhanouski yang merupakan seorang YouTube vlogger. Istri Siarhei Tsikhanousky yaitu Sviatlana Tsikhanouskaya kemudian menggantikan suaminya untuk maju menjadi kandidat presiden (BBC 2021). Pada Juli 2021, Viktor Babaryko yang berusaha mencalonkan diri sebagai calon presiden dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan korupsi. Asisten terdekat Viktor Babaryko, yaitu Maria Kolesnikova yang menjadi pemimpin protes juga ditahan pada bulan September 2021 dan menghadapi tuduhan dari otoritas Belarus yaitu konspirasi untuk merebut kekuasaan melalui cara-cara yang tidak konstitusional dan dijatuhi hukuman 11 tahun. Juru kampanye oposisi Maxim Znak juga dijatuhi hukuman 10 tahun karena dianggap mengancam keamanan nasional, merencanakan untuk merebut kekuasaan, dan ekstremisme (Mills 2021, 10).

Terkait kekerasan psikologis, Galtung menjelaskan kekerasan ini dilakukan pada jiwa dengan memberikan tekanan untuk mengurangi kemampuan mental atau otak. Kekerasan psikologis juga mencakup kebohongan, pencucian otak, berbagai jenis indoktrinasi, ancaman, dan hal lainnya yang berfungsi untuk mengurangi potensi mental. Kekerasan psikologis berdampak langsung pada individu yang akan mempengaruhi perilaku dan mental suatu individu (Galtung 1969, 169). Hal ini dapat terlihat dari hasil pemilu yang tidak jujur dan dimanipulasi oleh pemerintahan Lukashenko. Otoritas yang berkuasa di negara otoriter seperti Belarus mengontrol aturan permainan electoral. Strategi mereka difokuskan untuk membatasi rezim Lukashenko dari adanya resiko pemilu dengan menjaga pemilu tetap non-kompetitif, tetapi setidaknya tetap sah secara dangkal.

Pemilu sebelum tahun 2015 diwarnai dengan banyak kekecewaan karena tahun-tahun sebelumnya merupakan masa yang sulit. Namun pada pemilu tahun 2015, banyak masyarakat yang sudah tidak berharap banyak terhadap perubahan hasil pemilu. Salah satu perwakilan parlemen Alena Anisim mengatakan bahwa mereka yang memenangkan kursi parlemen “dipilih” daripada “terpilih” melalui pemilu. Para kandidat yang “dipilih” ini dianggap oleh rezim Lukashenko sebagai pilihan yang aman dan tidak akan membawa ancaman terhadap pemerintahannya (Bedford 2017, 387-388).

Hal ini menggambarkan sejauh mana manipulasi sistemik telah menyebabkan masyarakat Belarus kehilangan kepercayaan pada pemilu sebagai instrumen demokrasi. Bahkan mereka yang menjadi bagian dari sistem tidak percaya pada kebenaran pemilu. Mikalai Statkevich yang merupakan seorang mantan kandidat presiden menggambarkan pemilu Belarus sebagai ritual untuk mengkonfirmasi legitimasi para penguasa (Bedford 2017, 389). Sistem politik otoriter bertahan dan berkembang karena masyarakatnya membiarkannya terjadi sebagai akibat dari sikap apatis politik mereka. Belarus adalah rezim otoriter hegemonik yang benar-benar terkonsolidasi. Mayoritas penduduk menerima *status quo* politik meskipun mereka menyadari akan kurangnya standar demokrasi dalam masyarakat mereka. Ini merupakan akibat dari rasa takut akan represi dan pemahaman umum bahwa tidak ada alternatif politik selain Lukashenko (Bedford 2021, 809).

Meskipun ada aksi protes yang dilakukan oleh oposisi ketika hasil pemilu diumumkan, Lukashenko telah menunjukkan dirinya sebagai aktor yang siap menggunakan kekerasan dengan merespon aksi protes dengan keras. Hal ini

kemudian banyak membuat masyarakat Belarus kecewa dan trauma. Kegagalan oposisi untuk menggulingkan pemerintah menyebabkan hilangnya rasa hormat dimata masyarakat yang sudah kecewa, dan mungkin menyebabkan mereka menjadi “apatis politik”. Masyarakat yang melakukan aksi protes trauma dan ketakutan dengan apa yang akan mereka hadapi. Beberapa orang merasakan perasaan tertekan, sedih, dan depresi ketika melihat tingkat kekerasan yang dilakukan oleh rezim yang semakin memperkuat kekecewaan mereka terhadap sistem yang ada di Belarus (Bedford 2017, 393).

3.5 Motivasi (*Intended* atau *Unintended*)

Galtung menjelaskan suatu aktor bertindak karena adanya motivasi atau dorongan baik yang disengaja (*intended*) atau yang tidak disengaja (*unintended*). Kekerasan yang disengaja dapat diidentifikasi ketika ada niat jelas dari aktor atau subjek untuk melakukan kekerasan. Sedangkan kekerasan yang tidak disengaja dapat diidentifikasi ketika subjek atau aktor tidak memiliki niat secara langsung untuk melakukan kekerasan. Perbedaan ini penting ketika melihat apakah subjek merasa bersalah atau tidak, karena konsep kesalahan lebih dikaitkan dengan niat (Galtung 1969, 170-171).

Bagian penting dari strategi otokratisasi Lukashenko adalah mengakomodasi preferensi publik yang dominan pada isu-isu identitas nasional dan kebijakan ekonomi. Lukashenko mendukung peran proteksionis bagi negara dalam perekonomian dan mengusulkan langkah reformasi ekonomi secara bertahap, menangani populasi yang takut akan penurunan ekonomi, khususnya generasi tua, petani, pegawai negara, pekerja industri, dan militer. Dengan berjanji

untuk melindungi Belarus dari ancaman ekonomi dan politik eksternal dan internal, Lukashenko menawarkan kepada masyarakat apa yang telah digambarkan sebagai "*authoritarian bargain*" atau sejenis "kontrak sosial" dimana masyarakat diminta untuk menyerahkan kebebasan politik mereka dengan imbalan perlindungan keamanan dan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh negara. Mayoritas masyarakat Belarus bergantung pada pekerjaan dan keuangan negara. Sebagian besar penduduk yang bekerja dipekerjakan oleh pemerintah. Pada tahun 1997 hingga 2007, 55-60% dari personel yang dipekerjakan bekerja untuk perusahaan milik negara, sementara sebagian dari pekerja swasta dalam data statistik resmi bekerja di perusahaan yang kepemilikannya sebagian dimiliki oleh negara (Trantidis 2021, 123-124). Tujuan dari Lukashenko untuk menerapkan kontrak sosial ini adalah demi alasan ekonomi dan keamanan. Presiden Alexander Lukashenko pada tanggal 7 September 2004 mengatakan:

“Semoga Tuhan melindungi kita. Selama sepuluh tahun ini tidak ada masyarakat Belarus yang menjadi korban aksi teroris atau konflik bersenjata. Kami telah menjaga negara kami dari keterlibatan dalam petualangan internasional yang dapat mengancam kehidupan dan keamanan masyarakat bahkan hingga tingkat terkecil. Ini adalah pencapaian terbesar kami, rumah yang tenang dan nyaman, dimana kedamaian dan harmoni berkuasa.” (Wilson 2011, 206-297).

Dengan menerapkan kebijakan otoriter dan *state control economy* adalah upaya pemerintahan Lukashenko untuk mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan alasan keamanan negara dan ekonomi sehingga kekerasan struktural yang terjadi termasuk dalam golongan tidak disengaja atau *unintended*. Lukashenko memiliki pandangan bahwa ekonomi pasar secara ideologis tidak dapat diterima olehnya secara pribadi karena ide-ide ekonominya bersifat statis dan berakar pada masa Soviet.

Namun disisi lain, kontrak sosial yang dibangun oleh Presiden Alexander Lukashenko ini menekan masyarakat Belarus karena masyarakat dibatasi pergerakannya melalui represi yang dilakukan oleh otoritas keamanan, serta reformasi pasar dianggap akan mengancam kekuasaan Lukashenko di Belarus (Moshes and Nizhnikau 2019, 6). Lukashenko adalah pemimpin yang akan menggunakan segala macam cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemilihan presiden pada tahun 2020 diadakan dalam suasana ketakutan dan intimidasi masyarakat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan latar belakang penindasan yang dimulai segera setelah pengumuman hasil pemilihan Presiden. Meskipun ratusan ribu orang melakukan aksi protes selama berbulan-bulan, Presiden Alexander Lukashenko dapat mempertahankan kekuasaannya berkat sistem keamanan yang menyeluruh. Lukashenko mengatur semuanya tidak hanya melalui taktik polisi yang keras, janji-janji reformasi yang hampa, atau berlalunya waktu. Sebaliknya, Lukashenko mengandalkan pemaksaan, persuasi, dan represi yang lebih berbahaya dan seringkali tidak terlihat yaitu sebuah badan keamanan domestic yang sedikit diubah dari era Soviet, tetapi masih menggunakan nama lama yaitu KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*). KGB mengontrol jaringan mata-mata dan pemantau yang dikenal sebagai “kurator” yang mengawasi setiap pembangunan di Belarus mulai dari sekolah, bisnis, hingga administrasi kepresidenan. Agennya mengumpulkan materi mengenai siapa saja yang dicurigai tidak setia dan mengupin pembicaraan pejabat senior pemerintah untuk memastikan mereka tidak berkhianat. Para pekerja pabrik dan perusahaan lain yang dikelola negara yang mempekerjakan lebih dari 40% tenaga kerja negara berisiko kehilangan pekerjaan jika mereka dicurigai tidak

setia. Hal ini juga merupakan salah satu alasan Lukashenko mempertahankan model ekonomi Soviet (Nechepurenko 2021).

Banyak laporan oleh para korban dari berbagai kekerasan fisik dan cedera yang ada akibat dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang oleh rezim Lukashenko. Ribuan orang ditangkap dan ratusan orang terluka akibat penggunaan senjata tajam oleh pihak keamanan Belarus terhadap masyarakat yang melakukan aksi protes damai, bahkan dua orang dilaporkan telah meninggal. Jurnalis juga terus menjadi target penindasan oleh rezim Lukashenko. Hak jurnalis dan pers telah dilanggar dalam ratusan kasus termasuk pencabutan akreditasi, pemukulan, penahanan dan penangkapan, serta deportasi dan penangkapan yang seringkali dilakukan dengan alasan yang sewenang-wenang. Paradoksnya, para pengunjung rasa damai malah dituduh telah melakukan upaya untuk mengacaukan Belarus (Kolarzik and Terzyan 2020, 9).

Salah satu tahanan politik yaitu seorang aktivis oposisi, Yuri Voskresensky meyakinkan Lukashenko bahwa dia siap untuk diajak kompromi dan bersedia untuk bertindak sebagai mediator setelah dua bulan ditahan oleh KGB. Setelah dibebaskan dari penjara yang dia gambarkan sebagai “neraka”, Voskresensky mulai memuji Lukashenko sebagai “pemimpin yang kuat” dan “orang yang terbuka”. Voskresensky yang menderita penyakit kronis dan harus menerima perawatan rutin selama di penjara kemudian mendesak para aktivis oposisi untuk berhenti melakukan protes. Transformasi Voskresensky ini menyoroti bagaimana sistem hukum di Belarus yang didukung oleh banyak Lembaga penegak hukum, hanya melayani satu tujuan yaitu untuk mempertahankan Lukashenko untuk tetap berkuasa tanpa batas waktu (Nemtsova

2021). Berdasarkan penjelasan diatas, kekerasan struktural yang dilakukan oleh Presiden Alexander Lukashenko digolongkan sebagai kekerasan yang disengaja atau *intended* karena Lukashenko sebagai subjek memiliki niat dan dorongan untuk menyakiti objek yaitu masyarakat Belarus dengan melakukan berbagai kekerasan yang sudah dibangun dalam sistem selama bertahun-tahun demi tetap mempertahankan kursi kekuasaannya sebagai Presiden Belarus.

3.6 Pendekatan Positif dan Pendekatan Negatif

Dimensi selanjutnya yang dijelaskan oleh Johan Galtung adalah pendekatan positif dan pendekatan negatif. Pendekatan positif terjadi ketika subjek sebagai pihak yang memiliki pengaruh memberikan imbalan atau *reward* kepada objek ketika dianggap melakukan sesuatu yang benar oleh subjek. Pendekatan positif berorientasi pada pemberian penghargaan tetapi dengan demikian mempersempit rentang tindakan karena sebenarnya ada “pengendalian” dan cenderung manipulatif meskipun ada *reward* yang diberikan. Pendekatan negatif terjadi ketika subjek yang memiliki pengaruh memberikan hukuman atau *punishment* terhadap objek dengan tujuan membatasi tindakan objek karena dianggap berpotensi untuk menjadi ancaman bagi subjek (Galtung 1969, 170).

Selama beberapa tahun terakhir, perubahan telah terlihat dalam wacana ideologis pemerintah Belarus. Ideologi Belarus sekarang berfokus pada penguatan identitas nasional, menekankan perbedaan antara kepentingan Belarus dengan kepentingan Rusia, serta mengkaji kembali narasi sejarah ke arah yang menekankan kekhasan sejarah Belarus. Pemerintah juga telah mengubah sikapnya terkait bahasa dan budaya Belarus. Sebuah kampanye yang mempromosikan

bahasa Belarus sedang dilakukan dalam skala besar di bawah naungan ideolog negara. Pemerintah juga terlibat dalam promosi *vyshyvanka*, pakaian tradisional Belarus dan ornamennya. Strategi *soft Belarusianisation* ini perlahan dijalankan oleh pemerintah Lukashenko dimana kebijakan luar negeri Belarus berusaha tidak terlalu bergantung pada Rusia, tetapi juga tidak sepenuhnya berada dalam sisi Barat. Artikel yang mengkritik kebijakan Kremlin mulai muncul cukup teratur di media pemerintah. Perwakilan resmi dari pihak berwenang, meskipun tidak sampai mempromosikan gagasan persahabatan dengan Barat, tidak lagi merujuk Barat dengan menggunakan retorika 'musuh' seperti yang terjadi sebelumnya. Modifikasi wacana ideologis ini mungkin berarti bahwa rezim sedang mencari cara baru untuk mengatur hubungannya, baik dengan masyarakatnya sendiri maupun dengan negara-negara Barat. Namun, ini tidak berarti bahwa pihak berwenang siap untuk perubahan sistemik. Peran Presiden dan konsep negara tetap tidak berubah dalam wacana ideologis karena masih belum ada pembagian kekuasaan tripartit, dan ruang gerak masyarakat sipil yang tetap sempit (Rudkouski 2017, 1).

Sebelum tahun 2020, pemerintah Belarus juga tampaknya telah menghindari kekerasan langsung atau memenjarakan orang-orang yang berpikiran oposisi. Pada tahun 2015, semua tahanan politik yang tersisa dibebaskan. Sebagai imbalannya, *European Council*, yang sangat mengecewakan para aktivis hak asasi manusia dan politik Belarus, menghapus sebagian dari sanksi yang dijatuhkan kepada Belarus setelah peristiwa 2006 dan 2010. Rezim Lukashenko telah mengurangi penggunaan kekuatan dengan meningkatkan denda pada aktivitas oposisi, terutama yang terkait dengan pengorganisasian dan partisipasi dalam

protes tidak sah dan acara publik lainnya. Penindasan “tingkat rendah” ini dikombinasikan dengan represi struktural yang digunakan oleh pemerintah untuk membatasi ruang aksi bagi lawan-lawannya (Bedford 2017, 394).

Pendekatan positif dapat diidentifikasi dengan melihat perubahan wacana ideologis Belarus dimana kebijakan yang diambil lebih “terbuka” terutama mengenai ruang geopolitik Belarus. Barat bukan lagi “musuh”, tetapi Rusia juga bukan “teman” yang sedekat dulu. Langkah ini diambil Lukashenko demi memenuhi kepentingan pemerintahnya dan menciptakan suatu kondisi dimana Belarus bisa mengambil keuntungan dari keadaan ini. Jika Rusia terlalu mengontrol Belarus, maka Lukashenko akan mendekati ke Barat. Dan jika negara-negara Barat memiliki terlalu banyak tuntutan, maka Lukashenko akan kembali mendekati ke Rusia. Sehingga dapat dilihat bahwa ada hasil positif ketika langkah ini diambil oleh Lukashenko. Dengan berkurangnya penggunaan kekerasan terhadap oposisi bahkan melepaskan tahanan politik, pihak Barat menarik sanksinya terhadap Belarus, dan karena melihat aneksasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Krimea, membuat Belarus perlahan berusaha mengurangi pengaruh Rusia, tetapi tidak sampai menganggap Rusia sebagai musuh (Rudkouski 2017, 3). Ketika hal ini telah dilakukan oleh Lukashenko, pengakuan legitimasi yang didapat Lukashenko adalah salah satu bentuk *reward* yang membuat masyarakat Belarus seperti membenarkan hal yang dilakukan oleh Lukashenko. Hal ini kemudian membuat masyarakat Belarus tidak mempertanyakan kekuasaannya dan Lukashenko bisa terus berkuasa di Belarus.

Terkait pendekatan negatif, pemberian hukuman dilakukan dengan membatasi tindakan objek jika dinilai berpotensi akan mengancam subjek. Sebuah

negara otokratis dengan sistem administrasi komando pemerintahan membutuhkan mesin hukuman yang kuat. Efisiensinya merupakan faktor utama di balik keberlanjutan rezim. Lukashenko memanfaatkan otoritas keamanan untuk memberikan hukuman dan mengatur masyarakat Belarus. Saat ini, enam belas badan keamanan negara yang berbeda berfungsi di Belarus, dengan Komite Keamanan Negara, yang mempertahankan nama Sovietnya, KGB, di posisi kunci. Putra presiden, Viktor Lukashenko, mengawasi dinas keamanan. Ukuran badan-badan ini tidak diketahui, tetapi ketika menyangkut polisi reguler (milisi), Belarus memiliki rasio petugas polisi per kapita tertinggi di dunia. Dinas keamanan memiliki tiga fungsi utama. Mereka menindas oposisi, mencegah mobilisasi massa, dan mengontrol elit negara. Dinas keamanan juga secara hati-hati memantau birokrasi, elit bisnis, dan rekan-rekan mereka sendiri. Dalam sistem negara Belarus yang kolusif, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, dimana undang-undangnya sering kali diragukan dan bertentangan, hampir semua pegawai negeri dapat dituduh melakukan korupsi atau “penyalahgunaan wewenang”. Penangkapan para pengusaha papan atas karena penggelapan pajak merupakan hal yang rutin. Secara berkala, KGB menyelenggarakan *exemplary trial* dan penangkapan tingkat tinggi. Pada tahun 2018, misalnya, KGB menangkap lebih dari 50 orang karena korupsi dalam sistem perawatan kesehatan negara bagian (Moshes and Nizhnikau 2019, 7-8).

Pemerintahan Alexander Lukashenko sebisa mungkin menghilangkan potensi ancaman dengan memanfaatkan fungsi KGB. Dan jika masyarakat Belarus ada yang dianggap melanggar, maka akan ada hukuman yang diberikan. Tindakan kekerasan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan aksi

protes adalah buktinya. Banyak serangan penuh dilakukan oleh pasukan keamanan di beberapa titik di ibukota Minsk pada malam tanggal 11 Agustus 2020. Tidak ada unjuk rasa atau simbol protes disana, namun tiba-tiba orang-orang dikepung oleh penjaga keamanan dan masyarakat diharuskan berbaring di tanah lalu dipukuli. Banyak orang ditangkap dan dibawa ke penjara Okretina. Meskipun beberapa orang memohon untuk dipanggilkan ambulans, otoritas keamanan malah mengatakan bahwa mereka lebih baik mati saja (Nevedomskaya 2021). Dinas keamanan ini menjalankan tugas mereka dengan semangat karena adanya rasa takut terhadap Presiden Alexander Lukashenko. Para pejabat juga takut akan kemarahannya sehingga bagi mereka, lebih baik menghukum masyarakat secara berlebihan daripada menerima konsekuensi dari Lukashenko. Untuk memperkuat loyalitas mereka, anggota dinas keamanan juga mendapatkan gaji yang sangat besar dan apartemen bersubsidi (Nechepurenko 2021). Pendekatan negatif dengan pemberian hukuman ini kemudian membuat banyak masyarakat yang menginginkan perubahan dalam sistem Belarus sehingga mereka melakukan aksi protes terhadap pemilu pada tahun 2020. Presiden Alexander Lukashenko tidak mau menerima bahwa adanya reformasi sosial dalam masyarakat Belarus yang sudah tidak lagi bisa menerima kontrak sosial model Sovietnya sehingga membuat masyarakat Belarus kemudian turun ke jalan untuk melakukan aksi protes terbesar dalam sejarah pemerintahan Alexander Lukashenko (Moshes and Nizhnikau 2019, 19).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Belarus merupakan negara yang dicirikan dengan sistem otoritarianisme yang kuat selama seperempat abad terakhir. Alexander Lukashenko telah menjadi Presiden Belarus selama 27 tahun. Pemilihan Presiden yang dilakukan pada tahun 2020 mencerminkan perkembangan pemilu tahun-tahun sebelumnya dimana kandidat oposisi ditindas dan bahkan ditangkap oleh rezim Lukashenko. Belarus adalah negara yang sangat tersentralisasi dimana kekuasaan pada dasarnya merupakan instrumen demi memenuhi kepentingan Presiden dengan memprioritaskan kesetiaan dan pelaksanaan perintah yang ketat. Praktik ini ditandai dengan gaya pemerintahan otoriter Presiden Alexander Lukashenko yang melakukan berbagai macam cara untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Adanya pelanggaran hak-hak politik membuat masyarakat yang melakukan aksi protes dengan damai, yang kemudian dibalas oleh rezim Lukashenko dengan kekerasan.

Satu tahun setelah Lukashenko memenangkan pemilihan Presiden pertama di Belarus, sebuah referendum diadakan pada tahun 1995 untuk mencapai kepentingan Lukashenko pada saat itu yaitu membatasi kekuasaan parlemen yang menjadi saingan institusionalnya. Referendum kedua kemudian dilakukan satu tahun berikutnya dengan tujuan merubah konstitusi Belarus sehingga Presiden akan mendapatkan hak prerogative yang hampir tidak terbatas. Referendum

nasional kedua ini merupakan titik balik bagi Lukashenko untuk memperkuat otoritarianismenya di Belarus.

Kestabilan suatu rezim otoriter sangat bergantung pada penggunaan tiga pilar stabilitas yaitu represi, kooptasi, dan legitimasi. Lukashenko mempromosikan dirinya sebagai “Bapak” bagi masyarakat Belarus dan sebagai pemimpin yang jujur dan pemimpin yang bisa melindungi Belarus. Lukashenko juga membandingkan dirinya dengan kandidat oposisi demi mempertahankan legitimasinya. Dia menggambarkan lawan politiknya sebagai ancaman bagi identitas nasional dan stabilitas yang dibangun oleh rezim saat ini. Penggunaan represi di Belarus juga sangat parah. Aksi protes damai yang dilakukan pada pemilu sebelumnya diwarnai dengan kekerasan oleh otoritas keamanan Belarus. Rezim Lukashenko berusaha dengan keras untuk menghilangkan ancaman potensial sebelum menjadi kenyataan. Bertahannya sistem otoritarianisme di Belarus juga didukung oleh penggunaan kooptasi yang berbentuk kontrak sosial mode Soviet. Lukashenko menggunakan kontrak sosial dimana keamanan, ketertiban, dan kestabilan sosial dibalas dengan kesetiaan.

Selanjutnya, analisis teori kekerasan struktural dimana Johan Galtung mendefinisikan kekerasan struktural sebagai suatu keadaan yang menghasilkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dibangun dalam suatu struktur atau institusi seperti pemerintah sehingga menyebabkan peluang hidup yang tidak sama. Ada enam dimensi untuk mengidentifikasi kekerasan struktural yaitu subjek, objek, tindakan yang terdiri dari tindakan terlihat atau *manifest* dan yang tersembunyi atau *latent*, kekerasan fisik dan psikologis, motivasi yang menyebabkan kekerasan

baik yang disengaja atau *intended* maupun yang tidak disengaja atau *unintended*, serta pendekatan positif dan negatif.

Subjek merupakan aktor atau agen yang memiliki posisi lebih tinggi dimana dalam hal ini subjeknya adalah Presiden Alexander Lukashenko. Pengaruh yang dimiliki Lukashenko sangat besar dalam struktur pemerintahan Belarus terutama setelah referendum tahun 1996 yang semakin memperluas kekuasaannya sebagai Presiden. Dimensi berikutnya adalah ada atau tidaknya objek yang mengalami kekerasan yang membatasi tindakan manusia. Objek dalam kasus ini adalah masyarakat Belarus yang merasakan kekerasan dan rasa tidak aman akibat adanya represi dalam sistem. Dimensi selanjutnya adalah tindakan baik yang terlihat maupun tidak terlihat. *Manifest* dapat dilihat karena kekerasannya tampak dan bisa diidentifikasi dengan jelas. Dari peristiwa pemilu yang menimbulkan gejolak politik, dapat terlihat kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Belarus. Sedangkan *latent* hadir ketika kekerasan itu tersembunyi atau adanya keadaan dimana tidak menunjukkan kekerasan, tetapi ada potensi kekerasan itu akan hadir. Lukashenko memanfaatkan tiga pilar rezim otoriter yaitu legitimasi, represi, dan kooptasi sebagai strateginya demi melanggengkan kekuasaannya. Kekerasan dalam struktur yang dibangun Lukashenko pada awalnya tidak terlihat karena citra yang dibangun sebagai pemimpin yang jujur, lalu kemudian perlahan semakin tampak dengan melakukan monopoli kekuasaan dan kebijakan-kebijakan represif yang dirasakan oleh masyarakat Belarus.

Selanjutnya adalah kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Kekerasan fisik dilakukan oleh rezim Lukashenko kepada masyarakat Belarus yang dianggap

melanggar aturan dan mengancam keberlangsungan pemerintahannya. Berbagai cara dilakukan oleh Lukashenko untuk membungkam masyarakat seperti penangkapan aktivis oposisi, jurnalis, pengunjung rasa, dan pengamat. Rezim Lukashenko juga menggunakan berbagai senjata yang menyebabkan cedera serius serta berbagai penyiksaan dan kekerasan diberikan kepada masyarakat yang melakukan protes. Sedangkan kekerasan psikologis dilakukan melalui manipulasi sistemik terutama terhadap hasil pemilu. Penerimaan terhadap *status quo* selama ini juga merupakan akibat dari rasa takut yang akan dihadapi masyarakat apabila melawan rezim Lukashenko. Aksi kekerasan yang oleh otoritas keamanan juga menimbulkan rasa trauma yang mendalam yang mempengaruhi mental masyarakat Belarus.

Dimensi selanjutnya adalah dorongan atau motivasi baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dorongan yang tidak disengaja atau *unintended* terjadi ketika Presiden Alexander Lukashenko berupaya untuk menciptakan stabilitas keamanan dan finansial bagi Belarus dengan menggunakan kontrak sosial karena pandangan pribadinya bahwa ekonomi pasar secara ideologi tidak dapat diterima. Sedangkan dorongan yang disengaja atau *intended* terjadi ketika kontrak sosial yang dibangun dalam sistem ini membatasi pergerakan masyarakat Belarus dengan adanya kebijakan represif. Lukashenko mengandalkan pemaksaan dan represi melalui sebuah badan keamanan yaitu KGB untuk mengkriminalisasi siapapun yang dianggap mengancam kedudukannya sebagai Presiden dan tidak segan untuk menyakiti masyarakat Belarus dengan cara kekerasan demi kepentingannya. Dimensi terakhir adalah pendekatan positif dan negatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mekanisme *stick and carrot* dimana pendekatan

positif terjadi ketika ada pemberian reward atau penghargaan diberikan kepada objek, sedangkan pendekatan negatif terjadi ketika ada pemberian hukuman kepada objek. Pendekatan positif terlihat dari adanya pergeseran wacana ideologis Belarus dimana Belarus menjadi lebih “terbuka”. Hal ini terlihat dari dilepaskannya tahanan politik sehingga pihak Barat kemudian menarik sanksinya terhadap Belarus. Hasil positif yang didapat Lukashenko ketika mengambil langkah ini adalah pengakuan legitimasinya sehingga hal ini merupakan bentuk *reward* bagi Alexander Lukashenko. Sedangkan pendekatan negatif atau pemberian hukuman dilakukan Lukashenko untuk mengatur masyarakat Belarus. Lukashenko memanfaatkan otoritas keamanan terutama KGB untuk menindas oposisi, mencegah mobilisasi massa dengan berbagai kekerasan dan penangkapan, serta mengontrol pejabat elit negara. Rezim Lukashenko berusaha menghilangkan potensi ancaman semaksimal mungkin dengan menggunakan KGB. Jika masyarakat atau pejabat atau pegawai pemerintahan ada yang dianggap melanggar, maka hukuman keras akan diberikan.

Pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko yang tetap menggunakan cara lama untuk berkuasa mulai rapuh dengan adanya aksi protes besar-besaran pada tahun 2020 yang menyebabkan krisis politik. Perkembangan yang terjadi di Belarus memperlihatkan rapuhnya rezim otoriter ketika legitimasinya dipertanyakan. Penggunaan kekerasan dalam merespon aksi protes semakin membuat sistem yang sudah dibangun oleh Lukashenko selama bertahun-tahun tidak ditolerir lagi oleh masyarakat Belarus. Penangkapan berbagai golongan masyarakat membuat semakin banyak orang menyuarakan ketidaksukaannya terhadap rezim yang berkuasa. Sehingga hal ini membuat semakin banyak

masyarakat Belarus yang sadar politik dan meskipun Lukashenko masih berkuasa, *status quo* politik tentunya sudah tidak sama lagi terlebih ketika peristiwa ini juga mempengaruhi posisi rezim Lukashenko dalam komunitas internasional. Berdasarkan penjelasan diatas, enam dimensi yang dikemukakan oleh Galtung hadir dalam kasus ini dan dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Presiden Alexander Lukashenko melakukan kekerasan struktural terhadap masyarakat Belarus.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi adanya penelitian lanjutan mengenai dinamika politik Belarus terutama setelah krisis politik pada tahun 2020. Menarik untuk dilihat lebih jauh apakah resistansi politik akan terus berlangsung dan sejauh mana pemberian represi akan dilakukan oleh rezim Lukashenko. Serta apakah akan ada campur tangan lebih lanjut dari pihak luar seperti Uni Eropa ataupun Rusia dalam hal ini.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dijelaskan, penelitian ini tentunya masih mempunyai keterbatasan. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan struktural oleh Johan Galtung. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat melihat dari teori kekerasan kultural dengan melihat norma-norma sosial yang ada di Belarus, sehingga dapat melahirkan sudut pandang yang baru dalam mengamati krisis politik di Belarus.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC. 2021. *Belarus jails: Stories of fear and violence*. May 27. Accessed July 28, 2022. <https://www.bbc.com/news/world-europe-57238628>.
- Bedford, Sofie. 2017. "“The Election Game:” Authoritarian Consolidation Processes in Belarus ." *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, Volume 25, Number 4, Fall 2017, pp. 381-405* 381-406.
- Bedford, Sofie. 2021. "The 2020 Presidential Election in Belarus: Erosion of Authoritarian Stability and Re-politicization of Society." *Nationalities Papers (2021), 49: 5, 808–819, DOI:10.1017/nps.2021.33* 808-819.
- Blidaru, Mădălin-Cătălin. 2020. "EU’s human rights dialogues with Belarus and the ." *Technium Social Sciences Journal Vol. 11, September 2020 ISSN: 2668-7798* 378-390.
- Britannica, The Editors of Encyclopaedia. 2020. *Alexander Lukashenko*. August 26. Accessed October 14, 2020. <https://www.britannica.com/biography/Alexander-Lukashenko>.
- Burger, Ethan S., and Viktor Minchuk. 2006. "Alyaksandr Lukashenka’s Consolidation of Power." In *Prospects for Democracy in Belarus*, by Joerg Forbrig, David R. Marples and Pavol Demeš, 29-36. Washington, D.C.: The German Marshall Fund of the United States.
- Carboni, German. 2021. *A guideline to Belarusian repressive methods. Dealing with structural roots of dissent*. September 2021. <https://neweasterneurope.eu/2021/09/28/a-guideline-to-belarusian-repressive-methods-dealing-with-structural-roots-of-dissent/>.

- Crabtree, Charles, Christopher J. Fariss, and Paul J. Schuler. 2016. "The Presidential Election in Belarus, October 2015." *Electoral Studies*, *Forthcoming* 1-12.
- Digest, Belarus. 2013. *Is Inequality a serious problem in Belarus?* July 3. Accessed December 7, 2020. <https://belarusdigest.com/story/myths/is-inequality-a-serious-problem-in-belarus/>.
- Galtung, Johan. 1990. "Cultural Violence." *Journal of Peace Research*, Vol. 27, No. 3. (Aug., 1990), pp. 291-305 291-305.
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3 (1969), pp. 167-191 167-191.
- Gerschewski, Johannes. 2013. "The three pillars of stability: legitimation, repression, and co-optation in autocratic regimes." *Democratization*, 2013, Vol. 20 (2013), Iss. 1, pp. 13–38 <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.738860> 13-38.
- Guriev, Sergei. 2020. "The Political Economy of the Belarusian Crisis." *Intereconomics: Review of European Economic Policy*, Vol. 55, No. 5 274-275.
- Guriev, Sergei, and Daniel Treisman. 2015. "How Modern Dictators Survive: An Informational Theory of the New Authoritarianism." *NBER Working Paper 21136* 1-39.
- Haiduk, Kiryl. 2009. "Social Contract: A Conceptual Framework." In *Social Contracts in Contemporary Belarus*, 8-25. Minsk: Belarusian Institute for Strategic Studies.

- Hall, Stephen G. F. 2020. "Fatigued Authoritarianism in Belarus?" *E-International Relations* ISSN 2053-8626 <https://www.e-ir.info/2020/10/04/fatigued-authoritarianism-in-belarus/> 1-3.
- Ioffe, Grigory. 2014. "Lukashenka's Rise to Power and Belarusian Politics." In *Ressessing Lukashenka - Belarus in Cultural and Geopolitical Context*, 126. New York: Palgrave Macmillan.
- Ioffe, Grigory. 2003. "Understanding Belarus: Questions of Language." *Europe-Asia Studies* Vol. 55, No. 7 1009-1047.
- Kirakosyan, Artak, Alexandra Koulaeva, Valentin Stefanovich, and Pavel Sapelko. 2013. "Forced Labor and Pervasive Violations of Workers' Rights in Belarus." *FIDH - International Federation for Human Rights*, ISSN 2225-1804 1-76.
- Kolarzik, Nina, and Aram Terzyan. 2020. "The State of Human Rights and Political Freedoms in Belarus: Was the Crisis Inevitable?" *Post-Soviet Politics Research Papers* No. 4, 2020, DOI: 10.47669/PSPRP-4-2020 1-15.
- Kolarzik, Nina, and Aram Terzyan. 2020. "The State of Human Rights and Political Freedoms in Belarus: Was the Crisis Inevitable?" *Center for East European and Russian Studies: Post-Soviet Politics Research Papers*, No. 4, 2020 1-15.
- Lavrinenko, Olga. 2015. "Protests Against Fraudulent Elections in Belarus as Emancipation of the Parallel Civil Society." *Intersections. East European Journal of Society and Politics*, 1 (3): 120-139 120-139.

- Manaev, Oleg, Natalie Mnayeva, and Dzmitry Yuran. 2011. "More State Than Nation: Lukashenko's Belarus." *Journal of International Affairs, Fall/Winter 2011, Vol. 65, No. 1.* 93-113.
- Maples, David R. 2021. "Changing Belarus." *Canadian Slavonic Papers, 63:3-4,* 278-295, DOI: 10.1080/00085006.2021.1992923 278-295.
- Marples, David R. 1999. *Belarus: A Denationalized Nation.* Amsterdam: Harwooc Academic.
- Marples, David R. 2006. "The 2006 Presidential Elections in Belarus." In *Prospects for Democracy*, by Joerg Forbrig, David R. Marples and Pavol Demeš, 95-101. Washington D.C: The German Marshall .
- Melyantsou, Dzianis. 2020. "Political Crisis in Belarus: Reasons and Perspectives." *Institute For Security Policy* 3-16.
- Mills, Claire. 2021. "Belarus: One year on from the disputed Presidential election." *Commons Library Research Briefing, No. 9334* 1-29.
- Moshes, Arkady, and Ryhor Nizhnikau. 2019. "The Belarus Paradox: A Country of Today Versus A President of The Past." *Finnish Institute of International Affairs Briefing Paper June 2019 - 265* 1-8.
- Moshes, Arkady, and Ryhor Nizhnikau. 2019. "The Belarusian Paradox: A Country of Today Versus a President of the Past." *Finnish Institute of International Affairs. FIIA Briefing Paper No. 256* 1-8.
- Nechepurenko, Ivan. 2021. *'You Cannot Say No': The Reign of Terror That Sustains Belarus's Leader.* November 11. Accessed July 30, 2022. <https://www.nytimes.com/2020/11/14/world/europe/belarus-lukashenko-protests-crackdown.html>.

- Nechyparenka, Yauheniya. 2011. "Democratic Transition in Belarus: Cause(s) of Failure." *Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)*
<http://www.jstor.org/stable/resrep14202.7> 28-31.
- Nemtsova, Anna. 2021. *A Brutal Regime Jailed Him. Now He's the Dictator's 'Rat.'* September 10. Accessed July 30, 2022.
<https://www.thedailybeast.com/the-brutal-belarus-regime-jailed-him-now-hes-dictator-Alexander-lukashenkos-rat>.
- Nevedomskaya, Tatyana. 2021. *Victims of Belarus police violence: 'They said we should just die'.* August 13. Accessed July 30, 2022.
<https://www.dw.com/en/victims-of-belarus-police-violence-they-said-we-should-just-die/a-58846874>.
- Roache, Madeline. 2020. *Tens of Thousands Are Protesting in Belarus. Here's What's Behind the Uprising Against President Lukashenko.* August 18. Accessed October 14, 2020. <https://time.com/5880593/belarus-protests-lukashenko/>.
- Rostovtsev, Mikhail Ivanovich. 2021. *Belarus: Government and Society.* May 27. Accessed July 21, 2021.
<https://www.britannica.com/place/Belarus/Government-and-society>.
- Rudkouski, Piotr. 2017. "Soft Belarusianisation: The Ideology of Belarus in the Era of the Russian-Ukrainian Conflict." *OSW Commentary No. 253, November 3, 2017* 1-6.
- Samorukov, Maxim. 2020. "The Kremlin and The Protests in Belarus: What's Russia's Next Move? ." *Institute for Security Policy* 3-13.

- Silitski, Vital. 2003. "Explaining post-communist authoritarianism in Belarus." In *Contemporary Belarus - Between Democracy and Dictatorship*, 53-67. London: RoutledgeCurzon.
- Silitski, Vitali. 2005. "Preempting Democracy: The case of Belarus." *Journal of Democracy*, Vol. 16, No. 4 83-97.
- Trantidis, Aris. 2021. "Building an authoritarian regime: Strategies for autocratisation and resistance in Belarus and Slovakia." *The British Journal of Politics and International Relations*, [s://doi.org/10.1177/1369148120978964](https://doi.org/10.1177/1369148120978964) 1-23.
- Trantidis, Aris. 2021. "The Political Economy of Autocratization: The Case of Belarus, 1994–2006." *Communist and Post-Communist Studies*, December 2021 117-136.
- Unit, The Economist Intelligence. 2019. "Democracy Index 2018: Me Too? Political Participation, Protest and Democracy."
- Wilson, Andrew. 2011. "Building an Authoritarian State: Lukashenka's Second Term." In *Belarus - The Last Dictatorship in Europe*, 194-208. Yale University Press.
- Wilson, Andrew. 2011. "Building Authoritarianism: Lukashenka's First Term." In *Belarus - The Last Dictatorship in Europe*, 168-193. New Haven: Yale University Press.
- Wilson, Andrew. 2011. "Politics Either Side of Independence, 1989–1994." In *Belarus - The Last Dictatorship in Europe*, 160-167. Yale University Press.

Wilson, Andrew. 2011. "The Third Term: The Edifice Crumbles." In *Belarus - The Last European Dictatorship*, 209-236. Yale University Press.

